

**VISI DAN MISI PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA (PSI)  
DALAM PERSPEKTIF *SIYASAH***

**Skripsi**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat  
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Syari'ah**

Oleh

Misda Sari  
NPM: 1621020501

Prodi : Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*)



**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1442H/2020M**

**VISI DAN MISI PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA (PSI)  
DALAM PERSPEKTIF *SIYASAH***

**Skripsi**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat  
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Syari'ah**

Oleh

Misda Sari  
NPM: 1621020501



Prodi : Hukum Tata Negara ((*Siyasah Syar'iyah*))

Pembimbing I : Dr. Bunyana Solihin, M.Ag

Pembimbing II : Drs. H. Chaidir Nasution, M.H

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1442H/2020M**

## ABSTRAK

Partai politik merupakan salah satu metode yang mana dipergunakan untuk keperluan tercapainya suatu tujuan dari suatu organisasi khususnya organisasi politik, dalam hal agar terwujudnya tujuan tersebut masing-masing partai politik membuat struktur kepengurusan haluan dalam kegiatan berpolitiknya, dalam hal ini merancang metode atau cara atas suatu tindakannya berupa prinsip perumusan visi misi dari masing-masing partai politik, seperti halnya PSI (partai solidaritas Indonesia) yang sebagai salah satu partai politik baru yang sudah mulai berkiprah, dengan beberapa tujuan visi misi nya dengan tindakan agar visi dan misi tercapai PSI merumuskan prinsip guna tercapainya tujuan yaitu diantaranya dikutip menolak kaderisasi dari golongan usia lanjut dan menolak sistem politik usang, atas suatu batasan ketentuan usia dari pengkaderan agar tercapainya tujuan politik. Sehingga peneliti menuangkan ke dalam suatu karya ilmiah yaitu skripsi yang berjudul Visi & Misi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Dalam Perspektif Siyasah, Lantas Masalah dalam penelitian ini adalah 1). Bagaimana Visi dan Misi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dalam kaitannya dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)? 2). Bagaimana Visi Misi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dalam Perspektif Siyasah?. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu mengetahui Bagaimana akibat yang ditimbulkan dari Visi dan Misi Partai Solidaritas Indonesia dalam kaitannya dengan Negara Kesatuan Indonesia dan Bagaimana Visi dan Misi Partai Solidaritas Indonesia dalam Perspektif Siyasah.

Metode menggunakan jenis penelitian pustaka (*Library research*) yaitu penelitian yang dilakukan secara sistematis dan metodis untuk mengungkapkan data-data yang diperlukan dalam penelitian yang bersumber dari lokasi kepustakaan (data primer), jurnal dan lainnya (sekunder) dan pendukung lainnya (data tersier) yang menggunakan penelitian pola berpikir deduktif dan induktif yang bersifat pendekatan kualitatif. Didapatkan berdasarkan pada kaitan serta ketersediaan referensi kepustakaan, maka berdasarkan kesimpulan dapat kita tarik terhadap jawaban dari inti permasalahan dalam penelitian ini.

Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa visi dan misi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dalam kaitannya dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) telah sesuai dengan garis besar Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang salah satunya berlandaskan hukum, maka secara redaksional visi dan misi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) telah sesuai dengan cita-cita bangsa. Visi dan misi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang kemudian dituangkan dalam berbagai kebijakan partai, bila ditinjau dari *fiqh siyasah* terdapat pertentangan, misalnya pada pandangan mengenai perda syari'ah.

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Misda Sari

NPM : 1621020501

Jurusan : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **Visi Misi Partai Solidaritas Indonesia Perspektif Siyasa** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saluran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dalam *footnote* atau daftar pustaka apabila di lain waktu terdapat penyimpangan dalam karya ini maka tanggungjawab sepenuhnya ada di penyusun, demikian pernyataan dibuat agar dimaklumi

Bandar Lampung, November 2020

Penulis

Materai

6000

**Misda Sari**  
**1621020501**





**KEMENTERIAN AGAMA  
UIN RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat: Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung (0721) 703260

**PERSETUJUAN**


Judul Skripsi : **Visi dan Misi Partai Solidaritas Indonesia  
(PSI) dalam Perspektif Siyasa**  
Nama Mahasiswa : **Misda Sari**  
NPM : **1621020501**  
Program Studi : **Hukum Tata negara (Siyasa Syar'iyah)**  
Fakultas : **Syari'ah**

**MENYETUJUI**


Untuk dimunaqasahkan dan dipertahankan dalam sidang  
munaqasah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, 05 Oktober 2020


**Pembimbing I**

  
**Dr. Bunyana Solihin, M. Ag**  
**NIP. 195707051989031001**

**Pembimbing II**

  
**Drs. H. Chaidir Nasution, M.H**  
**NIP. 195802011986031002**

**Ketua Jurusan**

  
**Erenki, M.S.I.**  
**NIP. 198003152009011017**





**KEMENTERIAN AGAMA  
UIN RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat: Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung (0721)703260

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **VISI DAN MISI PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA (PSI) DALAM PERSPEKTIF SIYASAH**, disusun oleh **Misda Sari** NPM. 1621020501 Prodi **Hukum Tata negar** telah diujikan dalam sidang *munaqasyah* Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada hari/tanggal: **Senin, 26 Oktober 2020**

**TIM PENGUJI**

**Ketua : H. Rohmat, S.Ag., M.H.I.**

**Sekretaris : Dr. Ahmad Fauzan, M.H.**

**Penguji I : Drs. Susiadi A.S., M.Sos.I.**

**Penguji II : Dr. Bunyana Solihin, M.Ag.**

**Penguji III : Drs. H. Chaidir Nasution, M.H.**



**Mengetahui**

**Dekan Fakultas Syari'ah**

**H. Khairuddin, M.H.**

NPM. 16210221993031002

## MOTTO

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ

Sesungguhnya Allah tidak akan merubah sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri

(Q.S. ar-Ra'd: 11)





## PERSEMBAHAN

Skripsi sederhana ini penulis persembahkan sebagai tanda cinta, kasih sayang dan hormat yang tak terhingga kepada :

1. Kepada kedua orang tuaku tercinta, bapak A. Zahri dan ibu Ida Riyanti, yang telah melahirkan, merawat dan membesarkanku penuh cinta kasih, dan pengorbanan yang selalu mendoakanku setiap waktu, memberiku semangat, menginspirasi, dan yang selalu mengharapkan anak-anaknya tumbuh menjadi pribadi yang baik dan bermanfaat untuk semua orang. Terimakasih tak terhingga, semoga Allah memberikan kalian umur yang panjang sehingga aku bisa membahagiakan kalian kelak, dan semoga Allah selalu memberikan kalian kebahagiaan dunia dan akhirat.
2. Saudara kandung ku Imam Bochari yang selalu memberi dukungan tentang pendidikan adiknya dan doa yang tanpa henti.
3. Teman-temanku yang setia selalu memberikan dukungan.



## **RIWAYAT HIDUP**

Misda Sari, dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 07 Mei 1998, anak ke dua dari pasangan A.Zahri dan Ida Riyanti. Pendidikan dimulai dari sekolah dasar negeri 3 Bukit Kemiling Permai Bandar Lampung dan selesai pada tahun 2010, dilanjutkan dengan pendidikan sekolah menengah pertama (SMP) negeri 8 Bandar Lampung, selesai pada tahun 2013, selanjutnya melanjutkan studi pada sekolah menengah kejuruan (SMK) Negeri 4 Bandar Lampung, selesai dan mengikuti pendidikan tingkat perguruan tinggi pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung dimulai pada semester I Tahun Akademik 1438H/2016M.



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah dengan izin Allah SWT, segala puji syukur kupanjatkan atas segala nikmat-nikmat yang telah dikaruniakan kepada saya, baik nikmat kesehatan, ilmu, semangat dan petunjuk, sehingga skripsi dengan judul “VISI DAN MISI PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA DALAM PERSPEKTIF *SIYASAH*” dapat diselesaikan. Serta sholawat dan salam disampaikan kepada

Nabi Muhammad SAW, para keluarganya, sehabatnya dan pengikutnya. Atas bantuan semua pihak yang membantu baik bantuan materil dan immateril dalam proses penyelesaian skripsi ini, tak lupa dihaturkan terima kasih sedalam-dalamnya, secara rinci ungkapan terima kasih disampaikan kepada:

1. Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M. Ag selaku rektor UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di kampus tercinta
2. Dr. Bunyana Solihin, M.Ag. Selaku pembimbing I yang selalu meluangkan waktunya untuk membimbing penulis serta memberikan arahan demi terselesainya skripsi ini.
3. Drs. H. Chaidir Nasution, M.H. Selaku pembimbing akademik II dalam penyusunan skripsi yang senantiasa tanggap luwes serta baik terhadap para mahasiswanya serta selalu meluangkan waktunya untuk membimbing penulis serta memberikan arahan demi terselesainya skripsi ini.
4. Dosen-dosen Fakultas Syari'ah dan segenap civitas akademika UIN Raden Intan Lampung.

5. Kepala perpustakaan pusat dan fakultas serta segenap pengelola perpustakaan yang telah memberikan referensinya.
6. Ketua Prodi Hukum Tatanegara Bak Frankie, M.Si. beserta jajaran yang selalu memberikan arahan terhadap mahasiswa.
7. Sahabat-sahabatku Anggi Putri, Nova indah, Ayu syahira, Anjani, Lesta, Zerli, Intan, Tomy, Fransisco, Bagus, Geri, julio, Fahrizal yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu serta saudara saya Imam Bochari yang telah memberikan dukungan dan doanya.
8. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Hanya kepada Allah SWT penulis serahkan segalanya, mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat tidak hanya bagi penulis tetapi juga bagi seluruh para pembaca. Amin.

Bandar Lampung, 05 Oktober 2020

Penulis

**Misda Sari**

NPM. 1621020501



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
ABSTRAK .....	ii
SURAT PERNYATAAN .....	iii
PERSETUJUAN.....	iv
PENGESAHAN.....	v
MOTTO .....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi

### BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul.....	1
B. Alasan Memilih Judul.....	2
C. Latar Belakang Masalah .....	3
D. Fokus Penelitian .....	6
E. Rumusan Masalah.....	6
F. Tujuan Penelitian.....	7
G. Signifikansi Penelitian.....	7
H. Metode Penelitian.....	8

### BAB II LANDASAN TEORI

A. Hakikat Partai Politik.....	15
1. Definisi Partai Politik .....	15
2. Tujuan dan Fungsi Partai Politik .....	17
3. Prinsip dan Ciri Partai Politik.....	19
B. Pengertian dan Rumusan Visi & Misi .....	23
1. Definisi Visi dan Misi.....	23
2. Perumusan dan Unsur Visi dan Misi .....	27
3. Fungsi dan Tujuan Visi dan Misi Bagi Partai Politik.....	29
C. Siyasah Dusturiyah dan Prinsip Ketatanegaraan Islam .....	31
1. Siyasah Dusturiyah .....	32
2. Prinsip Ketatanegaraan Islam .....	42
D. Tinjauan Pustaka.....	57

### **BAB III HASIL PENELITIAN**

A. Sejarah Partai Solidaritas Indonesia .....	60
B. Visi, Misi dan Tujuan Partai Solidaritas Indonesia .....	62
C. Perolehan Partai Solidaritas Indonesia dalam Pemilihan Anggota Legislatif (PILEG 2019) .....	71

### **BAB IV ANALISA DATA**

A. Visi dan Misi Partai Solidaritas Indonesia dalam Kaitannya dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).....	74
B. Visi dan Misi Partai Solidaritas Indonesia dalam Perspektif Siyasah ...	78

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	80
B. Rekomendasi .....	80

### **DAFTAR PUSTAKA**



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Penegasan Judul

Penegasan terkait istilah judul dalam setiap penelitian sangat diperlukan karena hal ini tidak lain adalah untuk menghindari suatu kekeliruan dalam memahami suatu maksud dari judul tersebut. Adapun dari judul ini adalah Visi dan Misi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dalam Perspektif *Siyasah* yang kemudian mengenai uraian-uraian istilah diatas adalah sebagai berikut:

- a. Visi ialah kemampuan untuk melihat pada inti persoalan, pandangan atau wawasan kedepan; seluruh rakyat mempunyai yang sama mengenai perjuangan bangsa; kemampuan untuk merasakan sesuatu yang tidak tampak melalui kehalusan jiwa dan ketajaman penglihatan; apa yang tampak dikhayalan; penglihatan; pengamatan.<sup>1</sup>
- c. Misi adalah suatu langkah atau usaha guna mewujudkan visi yang telah dicanangkan guna mencapai sebuah tujuan, dalam hal organisasi partai misi yaitu langkah kecil secara tindakannya guna mewujudkan visi dari partai tersebut.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Menteri Pendidikan & Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka), h. 1734.

<sup>2</sup>*Ibid.*



- d. Partai Solidaritas Indonesia adalah partai politik baru yang didirikan pada tanggal 16 november 2014 berdasarkan Akte Notaris Widyatmoko, SH No. 14 Tahun 2014 <sup>3</sup>
- e. Perspektif adalah cara melukiskan suatu benda pada permukaan yg mendatar sebagaimana yang terlihat oleh mata dengan tiga dimensi (panjang, lebar dan tingginya; dua sudut pandang; pandangan)<sup>4</sup>
- f. *Siyasah* merupakan bentuk *mashdar(gerund)* dari *tashrif* (derivasi) kata *Sasa-Yasusu-Siyasat* <sup>5</sup> yang berarti mengatur, mengurus, mengemudikan, memimpin, dan memerintah.

Maka berdasarkan pemaparan mengenai penegasan judul di atas, dapat ditarik kesimpulan terkait penegasan judul penelitian, yakni suatu kajian *analisis fiqh siyasah* dengan menggunakan teori *Siyasah Dusturiyah* terhadap visi dan misi partai solidaritas Indonesia (PSI).

## B. Alasan Memilih Judul

Alasan penulis memilih judul diatas untuk diteliti adalah sebagai berikut:

### 1. Alasan Objektif

- a. Mengenai visi dan misi partai solidaritas Indonesia dalam hal penggunaan ideologi pada penggunaan tujuan dari visi dan misi nya tidak terdapat penjelasan secara jelas mengenai pedoman ideologi apa yang harus dipergunakan atau dicantumkan di dalam visi dan

---

<sup>3</sup>Grace Natalie, *ABC Partai Solidaritas Indonesia*, (Jakarta: DPP PSI), h. 03

<sup>4</sup>*Ibid.*

<sup>5</sup>Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Prenada Media, 2014), h. 3.

misi Partai Solidaritas Indonesia dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- b. Atas penerapan visi dan misi dari Partai Solidaritas Indonesia sendiri tidak secara nyata memaparkan ideologi pancasila sebagai pedoman mewujudkan tujuannya jika ditelisik dari segi siyasah sebab pancasila sendiri merupakan sumber materil dalam bernegara yang sudah mendapat persetujuan dari para tokoh ulama yang ikut merumuskan pancasila yang sudah berlandaskan pada terwujudnya kemaslahatan.

## 2. Alasan Subjektif

Pembahasan ini sangat relevan dengan disiplin ilmu pengetahuan yang penulis pelajari di Fakultas Syariah dan Hukum jurusan Siyasah serta terjadinya literatur yang menunjang sebagai referensi kajian dan data dalam usaha menyelesaikan karya ilmiah.

## C. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang universal yang misi nya ialah *rahmatan lil'alam* selain itu membawa konsep bagi umat manusia mengenai persoalan yang terkait pada sistem politik, ekonomi hingga penegakkan hukum. Bidang politik Islam menempatkannya sebagai sarana penjaga umat sehingga politik di dalam Islam merupakan penghadapan Islam dengan kekuasaan yang mengharuskan sikap politik yang berorientasi pada nilai keislaman dan tujuan kemaslahatan manusia.

Sehingga di setiap dari lingkup perpolitikan tidak terlepas dari yang namanya peran organisasi partai politik yang intinya untuk mencapai tujuan dari setiap partai politik memiliki konsep guna dijadikan pijakan di dalam membuat kebijakan berupa bentuk yang tertuang dari visi dan misi dari masing-masing partai.<sup>6</sup>

Fungsi dan tujuan dari visi dan misi itu sendiri bagi partai politik ialah diharapkan mampu memberikan suatu arah yang akan ditempuh oleh organisasi partai yang kedepannya akan berdampak bagi suatu kondisi atau keadaan yang secara objektif dan terukur maupun spesifik guna memberikan suatu kestabilan dalam mencapai tujuan dari partai politik itu sendiri.<sup>7</sup>

Hakikatnya di dalam suatu partai politik itu sendiri haruslah memiliki prinsip serta ciri-ciri dalam mengurus suatu urusan dengan cara totalitas yang dapat mencakup seluruh dimensi kehidupan manusia hingga yang mengatur urusan keterkaitan antara agama dan negara (*kaffah*) hingga tidak melakukan pemisahan antara agama dan negara. Konsepnya ialah suatu negara haruslah berideologikan religius atau ideologi spiritual, selain itu dalam partai politik haruslah berorientasi pada kebaikan kemaslahatan individu, kelompok dan negara, yang dalam penentuan kebijakannya haruslah tidak diperbolehkan bertentangan dengan nilai-nilai syariat Islam yang jauh dari tindakan ekstrimis dan diskriminatif.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup>Ridwan, Hubungan Islam dan Politik di Indonesia Perspektif Pemikiran Hasan alBanna, *Samudra Keadilan*, Vol. 12, No. 2, (November, 2012), h. 224.

<sup>7</sup> Yuni Ratna Dewi, Pemahaman Karyawan Terhadap Visi dan Misi, *FIKOM UPDM, Wacana*, Vol. XII, No. 3, (Agustus, 2004), h. 248.

<sup>8</sup>Ridho al-Hamdi, *Partai Politik Islam dan Praktik di Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), h. 10.



Partai politik di Indonesia khususnya dalam mencapai suatu tujuan haruslah berpijak pada visi dan misi dari masing-masing partai berbeda, hal ini dapat terlihat dari berbagai visi dan misi dari masing-masing partai, diantaranya ialah dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Partai yang baru didirikan ini memiliki beberapa visi dan misi yang dilakukan penancangan guna tercapai atau terwujudnya tujuan dari partai itu sendiri, di mana misi tersebut dapat dilihat ialah:

1. Menggalang perjuangan politik dengan nilai solidaritas nasional guna melanjutkan agenda reformasi dan demokratisasi.
2. Membangun kembali semangat republikanisme, merajut kembali rasa kebangsaan yang terserak, menanam kembali benih-benih idealisme serta mendirikan kembali benteng kebhinekaan dan pondasi gotong royong.

Dari beberapa visi dan misi yang dikutip di atas, namun pada kenyataannya atau secara riilnya dalam prinsip mencapai tujuan dari visi misi partai tersebut konsep kampanye dari Partai Solidaritas Indonesia berbeda serta berseberangan dengan misi dari partai solidaritas itu sendiri, salah satunya ialah kampanye penolakan poligami dengan landasan alasannya ialah melindungi kepribadian dan hak-hak wanita, selain itu penolakan peraturan-peraturan daerah yang berbau agama, seperti halnya Perda Syariah dengan alasan penolakannya karena berseberangan dengan prinsip solidaritas dan kebhinekaan bangsa, lantas dari sinilah, hemat penulis berdasarkan pemaparan latar belakang ini peneliti tertarik meneliti dari judul ini yang

mana dengan judul “ Visi & Misi Partai Solidaritas Indonesia Dalam Perspektif *Siyasah*.”

#### **D. Fokus Penelitian**

Lexy J Moleong mengungkapkan tujuan dari suatu penelitian merupakan tindakan untuk membatasi studi secara efektif untuk menyaring suatu informasi<sup>9</sup> Sehingga dapat dikatakan bahwa fokus penelitian juga merupakan suatu batasan ruang dalam *research development* supaya penelitian yang dilakukan tidak terbuang sia-sia dikarenakan ketidakjelasan suatu pengembangan pembahasan. Dengan demikian yang menjadi fokus penelitian ini adalah Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Visi-Misi Partai Solidaritas Indonesia, dalam politik ketatanegaraan.

#### **E. Rumusan Masalah**

Dalam penelitian ini penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Visi dan Misi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Dalam Kaitannya dengan Negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI)?
2. Bagaimana Visi dan Misi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dalam Perspektif *Fiqh Siyasah*?

---

<sup>9</sup>*Ibid.*

## F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada suatu rumusan masalah di atas, penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana visi misi dari partai solidaritas Indonesia (PSI) dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan *FiqhSiyasah* atas visi misi Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

## G. Signifikansi Penelitian

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan wawasan ilmu pengetahuan, bagi akademis maupun masyarakat pembaca khususnya mengenai visi misi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sebagai partai baru dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dan menjadi peserta dalam Pemilu 2019 yang lalu.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi diri sendiri khususnya maupun orang lain pada umumnya selain itu juga untuk melengkapi syarat-syarat yang diperlukan untuk mencapai gelar S1 program studi *Siyasah* pada Fakultas Syari'ah dan di UIN Raden Intan Lampung.



## H. Metode Penelitian

Metodologi merupakan yang pada hakikatnya memberikan pedoman atau tuntunan, tentang cara seorang peneliti dalam mempelajari, menganalisa, dan memahami suatu situasi yang akan dialaminya.

Sebagaimana metodologi yang dimaksud oleh Soerjono Soekanto bahwa metodologi merupakan suatu unsur yang mutlak dan harus ada di dalam suatu penelitian dalam pengembangan suatu ilmu pengetahuan,<sup>10</sup> sehingga metode yang digunakan dalam penelitian ini (*research*) menggunakan penelitian kualitatif yang bersifat pendekatan deskriptif analitis, sehingga dalam penelitian ini menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

### 1. Jenis dan sifat penelitian

#### a. Jenis penelitian

Apabila dilihat dari penelitian ini yang dilihat berdasarkan jenisnya, yaitu penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*libraryresearch*) yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan suatu data atau informasi dengan menelaah atau membaca AD/ART dan buku-buku yang relevan dengan partai politik khususnya Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan Ketatanegaraan Indonesia. Perspektif *fiqh siyasah* mengenai judul penulis yaitu terhadap visi misi partai solidaritas Indonesia.

---

<sup>10</sup>*Ibid*, h.7.

## **b. Sifat penelitian**

Sifat dari penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yaitu di mana merupakan suatu penelitian untuk memberikan data seteliti mungkin mengenai gejala-gejala yang ada di dalam kehidupan manusia. Hakikatnya hubungan di antara variabel-variabel yang dianalisis dengan menggunakan teori yang objektif. Sehingga dalam hal ini penulis akan menguraikan dan menggambarkan secara objektif terkait perspektif *fiqh siyasah* tentang visi misi dari partai solidaritas Indonesia.

## **2. Jenis Data**

### **a. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti atau ada hubungannya dengan objek yang diteliti.<sup>11</sup> Sumber data yang langsung berkaitan dengan objek penelitian dengan AD/ART PSI (Partai Solidaritas Indonesia), dokumen tertulis lainnya dari PSI (Partai Solidaritas Indonesia).

### **b. Data Sekunder**

Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang digunakan untuk menjelaskan dari bahan-bahan hukum primer.<sup>12</sup> Kemudian kaitannya dengan penelitian ini adalah upaya mencari data yang bersumber dari buku, artikel, majalah dll yang mempunyai keterkaitan dengan judul dari penulis.

---

<sup>11</sup> Muhammad Pabunda Tika, *Metodologi Riset Bisnis*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 57.

<sup>12</sup> *Ibid.* h. 53.

### c. Data Tersier

Sumber data tersier ialah sumber yang kegunaanya untuk memberikan petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan-bahan data primer dan sekunder.<sup>13</sup> Kemudian cara pencarian data-data ini dengan menggunakan data yang bersumber pada dari kamus, transkrip, daftar bacaan, katalog perpustakaan dan sebagainya yang berkenaan dengan judul dari penulis.

## 3. Pengumpulan data

Dalam melakukan pengumpulan data, peneliti menindaklanjuti dengan mengambil langkah, yakni dengan survey kepustakaan yang berkaitan dengan judul penelitian ini.

### a. Kepustakaan

Pada data yang didapatkan dari metode kepustakaan ini ialah melalui penelitian langsung pada sifat pustaka yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku, dokumen resmi, serta hasil penelitian.

### b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu catatan atau karya seseorang tentang sesuatu dalam situasi sosial mencari data mengenai variabel berupa foto, catatan, buku, maupun berupa sejarah kehidupan dan sebagainya.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> *Ibid.*, h. 391.

#### 4. Pengolahan Data

Dari data yang diperoleh seluruhnya kemudian bahan dalam penelitian ini diolah dan dianalisa dengan menggunakan suatu cara pengolahan data yang diantaranya sebagai berikut :

- a. Pemeriksaan data (*editing*) dimana ini merupakan cara yang dilakukan oleh penulis untuk mengoreksi terkait dengan kelengkapan data yang sudah dikumpulkan, kevaliditasan data yang telah diperoleh tersebut dan relevansinya dari data-data yang diperoleh.
- b. Sistemasi merupakan cara yang ditempuh oleh penulis dalam menempatkan data yang menurut data atau kerangka sistematika bahasan yang berdasarkan pada kronologi masalah yang diperoleh dari hasil penelitian tersebut.

#### 5. Analisa Masalah

Menurut Nasution, analisa data adalah proses menyusun, mengkategorikan data, mencari pola atau tema dengan maksud untuk memahami maknanya.<sup>15</sup> Sebagaimana dalam penelitian kualitatif terdapat berbagai analisis data yang dapat digunakan dalam melakukan sebuah penelitian (*research*). Penggunaan pada semua analisis data penelitian kualitatif senantiasa mendasarkan analisis data yang dilakukan selama keberlangsungan analisis tersebut.

---

<sup>15</sup>S. Nasution, *Metodologi Penelitian Dasar*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2004), h. 72.

Kemudian penyajian hasil penelitian yang diperoleh dari pengolahan data disatukan dengan analisa data.<sup>16</sup> Ketika seluruh data penelitian sudah berhasil terkumpul, proses selanjutnya ialah dengan melakukan pengolahan data melalui proses editing, yaitu peneliti memeriksa kembali terkait kelengkapan data yang diterima, kejelasannya, konsistensi jawaban atau informasi.

Kemudian proses berikutnya ialah melakukan analisa dengan menggunakan bentuk-bentuk metode analisa, yakni metode deduktif dan induktif. Metode deduktif adalah suatu metode yang digunakan dalam berpikir dengan bertolak dari hal-hal umum ke khusus,<sup>17</sup> dan metode induktif adalah suatu metode yang digunakan dalam berpikir dengan bertolak dari hal-hal khusus ke umum.<sup>18</sup> Metode deduktif dan induktif digunakan dalam membuat sebuah kesimpulan terkait batasan sikap yang berdasarkan pada akidah dalam pandangan *fiqh siyasah* tentang suatu penerapan tujuan dari visi misi yang dirancang untuk mencapainya dari suatu partai politik.

---

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, ...., h. 68.

<sup>17</sup> Hilda Handayani, *Pengertian Metode Induktif dan Metode Deduktif*, diakses dari <https://www.scribd.com/doc/285546689/Pengertian-Metode-Induktif-Dan-Metode-Deduktif>, tanggal 09 September 2019 pukul 23.58 WIB.

<sup>18</sup> *Ibid.*



## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Hakikat Partai Politik

##### 1. Definisi Partai Politik

Partai politik secara etimologis berasal dari kata partai dan politik. Kata *partai* berasal dari bahasa Inggris *part* yang berarti menunjuk kepada sebagian orang yang seasas, sehaluan dan setuju terutama di bidang politik. Sedangkan politik yang dalam bahasa Inggris *politics* berarti ilmu yang mengatur ketatanegaraan atau seni mengatur dan mengurus negara dan ilmu kenegaraan.<sup>19</sup>

Partai politik adalah perkumpulan orang-orang yang seideologi atau tempat atau wadah penyaringan dan pembulatan serta tempat berkumpulnya orang-orang yang seide, cita-cita dan kepentingan.<sup>20</sup> Partai politik Islam telah ada dan berkembang hingga saat ini. Dari sini dapat diketahui, bahwa lahirnya partai politik Islam di Indonesia menunjukkan kenyataan bahwa dinamika politik di negeri ini salah satunya berorientasi aliran. Menurut Th. Sumartana sebagaimana dikemukakan oleh Lili Romli, ada beberapa hal yang menyebabkan munculnya partai politik berbasis agama. Pertama, karena agama itu sendiri memiliki dukungan teologis untuk mencapai cita-cita berdasarkan keagamaan yang dipercayai. Kedua,

---

<sup>19</sup>BN Marbun, *Kamus Politik* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan), 2004), h.5.

<sup>20</sup>Deliar Noer, *Pengantar ke Pemikiran Politik* (Jakarta: Rajawali Press, 1993), h. 209.

karena ikatan politik dari para warganya menyebabkan agama sebagai faktor pengikat untuk mendukung pemimpin dari kelompok.<sup>21</sup>

Partai politik merupakan bagian dari infrastruktur politik dalam suatu negara. Untuk memahaminya maka beberapa ahli menyatakan pendapat tentang pengertian dari partai politik. Berikut ini pengertian partai politik yang dikemukakan oleh para ahli:

- a. Miriam Budiardjo menyebutkan bahwa partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya memiliki orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik, merebut kedudukan politik, biasanya dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijakan mereka.<sup>22</sup>
- b. Sigmund Neumann dalam *Modern Political Parties* mengemukakan definisi sebagai berikut:

*a political party is the articulate organization of society's active political agents, those who are concerned with the control of government power and who compete for popular support with another group or groups holding divergent views*

artai politik adalah organisasi dari aktivis-aktivis politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat atas dasar persaingan dengan golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup>Lili Romli, Islam Yes Partai Islam Yes; *Sejarah Perkembangan Partai-Partai Islam di Indonesia* (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2006), h. 115-116.

<sup>22</sup>Muhadam Labolo, *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia : Teori Konsep dan Strategi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), h. 11.

<sup>23</sup>*Ibid.*

- c. Menurut Firmanzah, ia menegaskan bahwa partai politik adalah organisasi publik yang bertujuan untuk membentuk opini masyarakat dan membawa pemimpinnya berkuasa dan memungkinkan para pendukungnya mendapat keuntungan dari dukungan tersebut. Karena itu partai politik setidaknya memiliki empat karakteristik dasar, yaitu organisasi yang berjangka panjang, memiliki struktur organisasi yang berjenjang (Pusat, Daerah, Cabang, Ranting) dan adanya pembagian divisi di setiap masing-masing level, memiliki orientasi kekuasaan sebagai alat untuk mengimplementasikan kepentingan rakyat, dan meraih dukungan suara sebanyak mungkin agar partai dapat diterima oleh masyarakat luas.<sup>24</sup>
- d. Selain pendapat para ahli tersebut, pengertian partai politik juga dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik, yang dimaksud dengan partai politik adalah setiap organisasi yang dibentuk oleh warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak untuk memperjuangkan baik kepentingan anggotanya maupun bangsa dan negara melalui pemilihan umum.<sup>25</sup>

Setelah memaparkan pengertian partai politik, jika dikaitkan dengan Islam maka Islam dalam konteks ini dipahami sebagai doktrin agama yang harus diimplementasikan dalam masyarakat serta mengatur seluruh aktivitas dan perilaku manusia di dalamnya. Sebagaimana yang

---

<sup>24</sup>Firmanzah, *Mengelola Partai Politik Komunikasi dan Positioning Ideologi Politik di Era Demokrasi* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), h. 66.

<sup>25</sup>Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai politik, Pasal 1 ayat (1).

telah ditegaskan dalam *Al-Qur'an* bahwa Islam merupakan agama komprehensif yang sudah mengatur segala sesuatu yang ada di muka bumi. Dengan demikian, partai politik Islam dapat dipahami sebagai sebuah organisasi publik yang memperjuangkan nilai-nilai Islam dalam konteks yang berbeda melalui penguasaan struktur kelembagaan pemerintah baik pada level legislatif maupun eksekutif. Proses mendapatkan kekuasaan itu diperoleh melalui keikutsertaan dalam pemilu serta melakukan kampanye dengan menjual isu dan program-program yang tidak lepas dari nilai-nilai ideologis Islam.<sup>26</sup>

Dari sini kemudian muncul istilah partai politik Islam atau partai yang dilandaskan pada simbol-simbol Islam, penganut Islam maupun substansi ajaran Islam. Indonesia sebagai negara yang mayoritas penduduknya muslim tak bisa mengelak dengan menjamurnya partai-partai yang menamakan dirinya sebagai partai Islam. Pembahasan bagaimana format dan bentuk partai Islam tidak lepas dari pola hubungan Islam dan politik yang sekarang ini berkembang di tengah masyarakat Indonesia. Partai politik Islam seperti PKS, PPP dan PBB secara tegas menamakan dirinya sebagai Partai politik Islam. Sementara PKB dan PAN secara jelas berlatarbelakang sebagai organisasi sosial keagamaan menamakan dirinya sebagai partai terbuka bagi penganut agama manapun.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup>Ridho Al Hamdi, *Partai Politik Islam;Teori dan Praktik di Indonesia* (Yogyakarta:Graha Ilmu, 2013), h. 8.

<sup>27</sup> Imam Yahya, *Gagasan Fikih Partai Politik dalam Khazanah Klasik* (semarang: Walisongo Press, 2010), h.15.

Berdasarkan kajian ilmu politik, penggunaan istilah “Partai Islam” setidaknya memiliki dua konotasi. Pertama, ideologi organisasi yaitu merujuk pada partai politik yang menjadikan Islam sebagai dasar ideologinya. Ideologi organisatoris dianggap penting karena ia merupakan tujuan dan orientasi. Ideologi menjadi alat pembeda antara satu partai dengan partai lainnya. Kedua, basis sosio-kultural yaitu partai politik dilihat bukan hanya sebagai organisasi tetapi juga sebagai sarana atau media bagi masyarakat atau kelompok- kelompok di masyarakat untuk mengartikulasikan, mengekspresikan dan memperjuangkan kepentingan politiknya. Sehingga, identitas dari sebuah partai bukan hanya bentuk organisasinya namun lebih kepada basis sosio-kultural kelompok masyarakat yang diwakilinya.

Sejalan dengan hal tersebut, berdasarkan dengan data dan fakta historis partai yang berasaskan Islam dibagi menjadi tiga kategori: pertama, partai Islam yang berasaskan Islam, kedua partai Islam yang berasaskan Islam dan Pancasila, ketiga partai Islam yang berasaskan Pancasila tetapi berbasis masa Islam.<sup>28</sup>

## 2. Tujuan dan Fungsi Partai Politik

Tujuan ini dapat dirumuskan tiga tujuan utama partai politik Islam.

- a. Masyarakat yang adil. Keadaan dimana seluruh masyarakat di suatu negara tidak ada yang merasa terintimidasi maupun terpinggirkan dari kehidupan masyarakat luas serta mendapatkan

---

<sup>28</sup>*Ibid.*



hak-haknya sebagai warga yang mendiami suatu daerah tertentu. Keadilan meliputi segala hal yang melekat pada mereka seperti hak hidup, hak mendapatkan keamanan, hak berbicara dan lain sebagainya.

- b. Masyarakat yang makmur dan sejahtera. Setiap manusia menginginkan hidup bahagia. Salah satu indikator hidup bahagia adalah memperoleh kemakmuran dan kesejahteraan hidup. Makmur mengindikasikan kehidupan seseorang sudah cukup dari segi materi dan sejahtera mengindikasikan bahagianya seseorang tidak hanya dari segi materi tetapi juga dari segi psikis, misalnya bahagia berada pada lingkungan keluarga yang peduli dan perhatian terhadap mereka.
- c. Masyarakat yang aman dan nyaman. Salah satu fungsi negara adalah membuat warganya merasa aman dari berbagai bentuk kejahatan maupun tindakan kriminal lainnya. Sedangkan nyaman adalah rasa bahagia dari segi psikologis seseorang yang hidup dalam lingkaran tertentu. Tujuan ini merupakan tujuan dari partai politik Islam untuk menjadikan masyarakat tidak merasa terganggu dari segala bentuk kejahatan maupun gangguan.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup>Ridho Al Hamdi, *Partai Politik Islam; Teori dan Praktik di Indonesia*,....., h. 10-11.

### 3. Prinsip dan Ciri-ciri Partai Politik

Islam dalam mengurus suatu urusan bagi organisasi politik atau dapat dikatakan partai politik sendiri, memiliki beberapa prinsipal dasar agar tujuan dan cita cita dari partai politik yang didasarkan pada prinsip juga sesuai dengan ketentuan dari prinsip Islam itu sendiri. Maka dapat diberikan penjabaran bahwa berikut beberapa prinsip partai politik Islam

- a. *Syumuliyah*, prinsip ini menyatakan bahwa sebuah partai politik dalam Islam harus dipahami sebagai *kaffah*, total dan komprehensif dan mencakup segala dimensi kehidupan manusia dengan tidak memisahkan antara agama dan negara. Sehingga berdasarkan kesimpulan yang dapat ditarik dari prinsip *syumuliyah* bahwa dalam unsur partai setiap partai politik yang baik berasaskan hanya Islam, ataupun pancasila haruslah bersifat secara luas dan totalitas dalam setiap kegiatan berpolitik mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat dalam bernegara di dalam suatu negara yang mengharuskan ideologi spiritual tidak bisa dipisahkan dengan urusan bernegara, seperti halnya di negara Indonesia dengan berasaskan pancasila dalam penerapan kehidupan bernegara harus berdasarkan berpusat pada sila pertama yang mana berhubungan dengan pemahaman ideologi yang bersifat spiritual.
- b. *Al-ishlah*, prinsip ini menyatakan bahwa suatu partai politik Islam dalam hal kebijakan yang ditempuh berorientasi pada perbaikan individu, masyarakat, pemerintah dan negara. Sehingga dengan

prinsip ini dapat dilihat dengan konsep melalui media dakwah. Ketentuan *al-Ishlah* dapat ditentukan bahwa prinsip ini haruslah dilakukan untuk perbaikan akhlak dan perilaku terkhusus individu yang kemudian secara umum berorientasi pada masyarakat dan juga pemerintah untuk mengatur kegiatan bernegara dan juga pemerintahan agar tidak terjadi suatu penyimpangan yang dapat dilakukan melalui media dakwah sehingga tidak dapat merusak tatanan masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang jauh dari kehidupan ideologi sesuai dengan negara Indonesia yang berpusat kepada ideologi spiritual sesuai ketuhanan yang maha esa.

c. *Al-syari'ah* (Konstitusional), prinsip ini menyatakan bahwa suatu kebijakan yang akan dilakukan harus dapat mempertimbangkan aspek fleksibilitas dan legalitas formal yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Ketentuan mengenai prinsip ini bahwa dalam ketentuan suatu kebijakan yang akan diterapkan haruslah dapat mempertimbangkan aspek fleksibel dan legalitas baik secara formil ataupun materil yang ketentuan untuk penerapan khususnya jika prinsip ini di negara Indonesia haruslah tidak bertentangan sesuai dengan masing-masing ajaran agama yang sudah berlaku di Indonesia, seperti halnya suatu kebijakan dalam pemerintahan yang akan dilakukan tidaklah boleh bertentangan dengan ajaran syariat Islam, begitupun sebaliknya bagi agama-agama yang lain berlaku

di Indonesia. Sehingga dapat tercapainya prinsip bernegara berkeadilan dan pluralitas.

- d. *Al-wasath* (Moderat), prinsip ini menyatakan bahwa dalam hal kebijakan, program, sikap, dan perilaku harus sejalan dengan masyarakat muslim dan jauh dengan sikap ekstrimitas dan diskriminatif.<sup>30</sup> Ketentuan prinsip *wasath* jika ditelaah dapat dikatakan bahwa dalam negara Indonesia suatu kebijakan ataupun program haruslah sejalan seirama dengan masyarakat beragama dengan berlandaskan pada dasar ketentuan-ketentuan nilai-nilai spiritual, tanpa adanya muncul sikap ekstrimitas maupun diskriminatif terhadap individu ataupun golongan/kelompok tanpa membedakan suku, ras ataupun umur.

Sedangkan jika ditelisik atas suatu ciri-ciri dari politik Islam itu sendiri yang mana jika didasarkan pada pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa politik Islam memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

- a. Berorientasi pada kemaslahatan umat

Ciri ini mendeskripsikan bahwa suatu partai sebelum terbentuk ataupun sudah terbentuk dalam mewujudkan cita-cita ataupun tujuan yang sudah sesuai dengan visi dan misi suatu partai haruslah berorientasi terhadap kepentingan atau keselamatan individu masyarakat.

---

<sup>30</sup>*Ibid*, h. 12.

b. Berlandaskan ideologi spiritual

Ciri yang kedua dapat dideskripsikan bahwa suatu pembentukan partai politik yang dalam tujuan partai sesuai dengan visi dan misi-nya haruslah landasan pemikiran partai politik tersebut berdasarkan kepada ideologi atau ajaran yang menjunjung ajaran keagamaan/spiritual yang bersifat plural dan toleransi dalam ketatanegaraan bernegara terkhusus dikaitkan dengan negara Indonesia. Supaya dapat terciptanya prinsip keadilan dan kesamaan sesuai dengan tujuan bernegara ataupun prinsip dasar berdasarkan ajaran *fiqh siyasah*.

c. Memenuhi aspek pertanggungjawaban

Ciri yang ketiga mengenai aspek pertanggungjawaban dapat dideskripsikan bahwa suatu partai politik dalam proses untuk mencapai suatu tujuan dari partai haruslah dapat memenuhi aspek pertanggungjawaban atas segala tindakan dari suatu partai dalam merencanakan ataupun menjalankan suatu kebijakan atau peraturan yang dikeluarkan suatu partai politik dalam mencapai tujuan dari visi-misi tersebut.

d. Adanya seni dan kreasi penguasa dalam pengaturan pemerintahan maupun perundang-undangan.<sup>31</sup> Ciri ini dapat dideskripsikan bahwa sebagai partai politik haruslah memiliki ciri seni dan kreasi masing-masing partai politik supaya dalam penguasaan untuk mengatur

---

<sup>31</sup>Mutiara Fahmi, *Petita*, Prinsip Dasar Hukum Politik Islam dalam Perspektif Al-Qur'an, Vol. 2, Nomor. 1, (April, 2017), h. 50.



suatu pemerintahan maupun pengaturan suatu undang-undang dapat terciptanya kemaslahatan bagi seluruh aspek masyarakat agar tatanan peraturan kehidupan bernegara tidaklah selalu berpaku terhadap suatu aspek metode dalam penetapan pemerintahan yang itu-itu saja.

## B. Pengertian & Perumusan Visi-Misi

### 1. Definisi Visi

Visi ialah suatu tentang gambaran mengenai tujuan atau keinginan di masa depan yang akan datang (*future*), yang secara realistis dilakukan dengan berbagai tindakan guna mewujudkannya dalam kurun waktu tertentu. Selain itu visi merupakan suatu pernyataan yang ditulis ataupun yang diucapkan dalam waktu yang bertepatan atas perumusannya dengan cakupan untuk mencapai masa yang akan datang. Hax dan Maljuf menyatakan terkait visi, mereka berpendapat bahwa visi ialah suatu pernyataan yang merupakan sarana untuk:

- a. Keberadaan organisasi mengenai suatu tujuan serta tugas pokok yang berfungsi untuk alasan komunikasi antar variabel organisasi
- b. Mempertunjukkan *framework* hubungan antara *stakeholder* (sumber daya manusia, organisasi, konsumen, serta pihak lain yang terkait) dengan organisasi
- c. Menyatakan sasaran utama kinerja organisasi dalam arti pertumbuhan serta perkembangannya.

Sehingga bagi suatu partai visi merupakan suatu yang menggambarkan mengenai moral imajinasi terhadap suatu profil apa yang diinginkan mengenai tujuannya di masa depan.<sup>32</sup>

Sedangkan misi ialah suatu pernyataan mengenai hal-hal yang harus dicapai oleh suatu organisasi bagi pihak yang berkepentingan di masa yang akan datang.<sup>33</sup>

Jika ditinjau dari suatu segi atau sudut pandang mengenai misi terhadap pembangunan Indonesia, yaitu mewujudkan Indonesia yang aman, damai, adil, demokratis, sejahtera, serta dihormati pada pergaulan internasional, ketentuan tersebut tidak pernah henti dilakukan di setiap pergantian tabuk pemerintahan di Indonesia. Sehingga terhadap suatu permasalahan yang dihadapi Indonesia dan cara mewujudkan visi jangka panjang serta menengah terhadap tujuan pembangunan negara Indonesia, dapat dirumuskan seperti berikut ini diantaranya,<sup>34</sup>

Aman dan damai, situasi atau kondisi mengenai keamanan serta kedamaian terhadap satu visi Indonesia jangka panjang merupakan hak atas setiap orang dan setiap bangsa guna menikmatinya, keadaan aman dalam hal ini mengandung makna bahwa suatu keadaan yang bebas dari bahaya, serta ancaman dari dalam ataupun luar, selain itu aman juga mencerminkan suatu keadaan tentram, tidak ada rasa takut ataupun khawatir. Sedangkan damai memiliki makna bahwa tidak terjadi konflik,

---

<sup>32</sup>Ahmad Calam, Amnah Qurniati, Merumuskan Visi & Misi Lembaga Pendidikan, *Ilmiah Saintikom*, Vol. 15, No. 1, (Januari, 2016), h. 53-56.

<sup>33</sup>*Ibid.*

<sup>34</sup>Susilo Bambang Yudhoyono, M. Jusuf Kalla, *Membangun Indonesia Yang Aman, Adil dan Sejahtera*, (Jakarta: Seketeris Negara, 2004), h. 14.

tidak ada kerusuhan, tidak adanya keadaan permusuhan, serta keadaan yang rukun dalam sistem negara hukum.<sup>35</sup>

Adil dan demokrasi yaitu suatu keadaan yang memiliki makna yang dalam bagi bangsa dan Indonesia, sebab ini dapat terlihat pada pembukaan undang-undang dasar negara republik Indonesia 1945. Sehingga adil dapat menempati posisi penting dalam falsafah dan dasar negara pancasila, yang dalam penyebutannya terdapat dua indikasi yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tanpa adanya keadilan pada dasarnya bangsa Indonesia belum sepenuhnya merdeka.<sup>36</sup>

Sehingga kata adil tidak bertempat jauh dengan demokrasi, sebab konsep keadilan juga dihubungkan dengan demokrasi, sehingga dalam hal ini demokrasi memiliki makna sebagai suatu pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban hingga perlakuan yang sama bagi setiap warga negara di hadapan hukum dan pemerintahan<sup>37</sup>

Kesejahteraan Indonesia, konsep kesejahteraan pada visi Indonesia dalam jangka panjang, memiliki makna terhadap kesejahteraan ialah salahsatu tujuan pembangunan yang harus senantiasa ada, ketentuan ini dengan secara tegas tertuang pada UUD 1945 yang menyatakan bahwa pemerintahan berkewajiban mengupayakan kesejahteraan umum yaitu

---

<sup>35</sup>*Ibid*, h. 15.

<sup>36</sup>*Ibid*, h. 16.

<sup>37</sup>*Ibid*, h. 17.

kesejahteraan rakyat dan negara Indonesia, dengan konsep kesejahteraan ini ialah dalam keadaan sentosa dan makmur.<sup>38</sup>

Sehingga apabila visi jangka panjang, atas ketiga tujuan tersebut, yaitu keadaan aman dan damai, adil dan demokrasi, serta sejahtera terkait satu dengan yang lainnya serta harus dapat dicapai secara bersama, sehingga perlu ditekankan bahwa kesejahteraan ialah untuk seluruh rakyat sesuai dengan amanat pembukaan UUD 1945, dan merupakan suatu kewajiban bagi siapa pun pemerintahan yang berkuasa.<sup>39</sup>

Sedangkan jika melihat pendefinisian atas misi adalah tahapan-tahapan yang harus dilalui untuk mencapai visi tersebut. Selain itu, misi juga merupakan deskripsi atau tujuan mengapa perusahaan, organisasi atau instansi tersebut berada di tengah-tengah masyarakat. Misi juga bisa dikatakan sebagai penjabaran sebuah visi. Jika visi hanya dituliskan dalam satu kalimat saja, maka misi akan dijabarkan dengan beberapa kalimat yang mudah untuk dipahami pembaca atau siapa saja yang melihatnya.

Jika diambil kesimpulan, maka pengertian atau definisi misi adalah:

- a. Misi adalah penjabaran-penjabaran dari sebuah visi perusahaan, instansi, atau organisasi.

---

<sup>38</sup>*Ibid*

<sup>39</sup>*Ibid*, h. 19.

- b. Misi adalah langkah-langkah atau tahapan-tahapan yang harus dilalui sebuah perusahaan, instansi, atau organisasi untuk mencapai visi utama.
- c. Misi adalah langkah-langkah yang bisa diambil untuk merangsang adanya pencapaian visi utama.<sup>40</sup>

## 2. Perumusan dan Unsur Visi& Misi

Terhadap suatu organisasi mengenai visi terdapat peranan yang amat penting guna menentukan terhadap suatu arah kebijakan serta karakteristik organisasi, sehingga ada beberapa hal yang harus diperhatikan mengenai perumusan terhadap suatu visi diantaranya:

- a. Suatu visi haruslah dapat memberikan panduan, motivasi serta arahan.
- b. Suatu visi haruslah dapat disebarkan pada kalangan anggota organisasi.
- c. Suatu visi dapat digunakan guna menyebarluaskan keputusan atas tindakan organisasi pada hal terpenting.
- d. Suatu visi sifatnya tidaklah statis dan tidak untuk selamanya.<sup>41</sup>

Sedangkan terhadap perumusan mengenai misi adalah setelah terbentuknya atas suatu visi, maka setelah itu akan terbentuknya gambaran mengenai misi, sehingga dapat dikatakan misi ialah suatu tindakan atau upaya guna mewujudkan perumusan suatu visi sebelumnya

---

<sup>40</sup> Heri, *Pengertian Visi dan Misi*, Diakses Pada Laman Web <https://salamadian.com/pengertian-contoh-perbedaan-visi-dan-misi/>, Pada Hari Selasa, Pukul 08:00 WIB

<sup>41</sup> *Ibid.*



ke dalam bentuk rumusan tugas. Sehingga dengan demikian misi merupakan suatu bentuk layanan guna pemenuhan atas suatu tuntutan yang tertuang dalam suatu visi dengan berbagai indikatornya.

Sehingga dengan begitu terdapat beberapa kriteria mengenai suatu perumusan misi diantara lain kriteria tersebut tertuang ketentuan sebagai berikut:

- a. penjelasan tentang produk atau pelayanan yang ditawarkan sangatlah diperlukan oleh masyarakat.
- b. Haruslah jelas serta memiliki sasaran publik yang akan dicapai
- c. Mengenai kualitas produk serta pelayanan yang ditawarkan mempunyai daya saing yang dapat memberikan keyakinan pada masyarakat.
- d. Penjelasan mengenai aspirasi bisnis, yang diinginkan pada masa mendatang selain itu juga bermanfaat dan keuntungannya bagi masyarakat terhadap produk serta pelayanan yang tersedia.<sup>42</sup>

Mengenai visi dan misi dengan keadaan baik haruslah dapat memberikan pernyataan dalam pertimbangan atas berbagai unsur terpenting, sehingga haruslah dijadikan dasar pertimbangan sebelum pernyataan dari suatu visi misi dirumuskan. Sehingga unsur-unsur tersebut dapat dijelaskan pada penjabaran di bawah ini diantaranya:

- a. Mengenai unsur dari visi misi dalam pertimbangannya adalah audiens sasaran (*target audience*), sehingga unsur ini menghendaki

---

<sup>42</sup>*Ibid*

rumusan visi misi yang menyatakan kepada siapa rumusan ini ditujukan atau siapa *stakeholder* dari organisasi tersebut, mengenai kelompok ini dapat mencakup seperti halnya pada sasaran masyarakat, kader organisasi.

- b. Mengenai unsur yang kedua ini yang harus diperhatikan dalam perumusan visi misi organisasi adalah rentang cakupannya, seperti rentan pernyataan visi-misi yang demikian singkat berupa satu kalimat bahkan ada yang lebih terdapat banyak kalimat.
- c. Mengenai unsur dari visi misi yang ketiga ini ialah mengenai bahasa yang akan digunakan dalam perumusan visi-misi agar terbentuknya rumusan misi yang baik.
- d. Mengenai misi yang selanjutnya yaitu bahwa pernyataan visi misi harus bertahan dalam jangka waktu tertentu agar tetap memiliki makna bagi keberadaan organisasi dalam jangka waktu yang lama.<sup>43</sup>

### 3. Fungsi dan Tujuan Visi Misi bagi Partai Politik

Bagi penerapan visi dan misi agar dapat terwujud sesuai dengan apa yang dicita-citakan bagi suatu organisasi, dalam hal ini atas suatu dari penelitian ini ialah partai politik maka, sebelum itu harus terlebih dahulu memahami hakikat dari fungsi dan tujuan visi misi tersebut.

---

<sup>43</sup>Yusuf Hamdan, Pernyataan Visi & Misi Perguruan Tinggi, *Mimbar*, Vol. XVII, No. 1, (Maret, 2001), h. 95.

Maka dengan sendirinya fungsi dari visi dan misi yaitu diantaranya:

- a. Bagi visi sendiri diharapkan mampu memberikan suatu arah yang ditempuh oleh suatu organisasi yang mempunyai peran penting guna melakukan atau mengalami perubahan sepanjang waktu. Sedangkan bagi misi sendiri ialah target dari organisasi yang terukur, objektif dan spesifik guna memberikan kestabilan dalam manajemen dan memimpin suatu organisasi.<sup>44</sup>

Sehingga pada ketentuan dari fungsi di atas tersebut maka, tujuan atau manfaat dari visi misi sendiri ialah dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Terjaminnya suatu tujuan atas kesatuan dan keutuhan dari setiap anggota organisasi yang mana, jika dilihat pada partai politik itu sendiri agar tujuan politik dari organisasi partai politik tersebut terjamin tujuannya maka haruslah dilaksanakan dengan konsep tekad yang bulat serta kesatuan.
- b. Tersedianya sumber alokasi daya maupun dana dari organisasi, sehingga dikaitkan dengan partai politik agar tujuan dari kegiatan perpolitikannya dapat tercapai maka manfaat atau tujuan dari visi misi tersebut ialah tersedianya secara totalitas dari mana sumber alokasi daya maupun dana didapatkan

---

<sup>44</sup> Yuni Retna Dewi, Pemahaman Karyawan Terhadap Visi Misi dan Tujuan FIKOM UPDM, *Wacana*, Vol. XII, No. 3, (Agustus, 2004), h. 249.

- c. Tersedianya dasar pengembangan dan evaluasi kinerja bagi organisasi yang mana partai politik dalam hal ini, guna tujuan dari partai tersebut dapat tercapai maka, tersedianya program pengembangan serta evaluasi bagi kinerja anggotanya.
- d. Tersedianya proses penterjemah tujuan dalam struktur organisasi, bagi partai politik khususnya ialah dalam memahami atau mentafsirkan suatu tujuan dengan adanya visi misi itu sendiri dapat membantu berjalannya tujuan dari partai politik.<sup>45</sup>

### C. Siyasah Dusturiyah & Prinsip Ketatanegaraan Islam

Konsep pengklasifikasian *siyasah syar'iyah* dapat dibedakan menjadi beberapa jenis pengklasifikasian, akan tetapi dalam hal pembahasan ini, terkait judul yang diangkat peneliti mengkaitkannya dengan jenis siyasah dusturiyah, serta keterkaitan siyasah ini tidak terlepas dari yang namanya prinsip dari ketatanegaraan, tujuan tersebut supaya terdapat sinkronisasi antara suatu pemerintahan di dalam sebuah negara maka perlu adanya prinsip ketatanegaraan di dalam Islam tujuan itu supaya dapat terciptanya kemaslahatan di dalam suatu negara, maka mengenai ketentuan ini dapat dibahas berdasarkan uraian-uraian di bawah ini.

---

<sup>45</sup>*Ibid*, h. 249.

## 1. *Siyasah Disturiyah*

### a. Pengertian

*Dusturiyah* merupakan bagian bidang dalam ilmu *siyasah* yang membahas mengenai ketentuan peraturan dalam bernegara. Mengenai konsep *dusturiyah* terdapat pembahasan mengenai bidang-bidang pembahasannya antara lain yaitu konsep konstitusi (UUD Negara), legislasi (perumusan undang-undang), demokrasi dan syura.<sup>46</sup>

Problematika pembahasan mengenai *fiqh siyasah* ialah hubungan antara pimpinan di salah satu pihak dengan rakyat di salah satu pihak lain serta kelembagaan atau organisasi yang ada di dalam masyarakat. Yang pada konsepnya untuk dapat merealisasikan kemaslahatan manusia untuk memenuhi kebutuhannya.<sup>47</sup>

Setelah mengalami penyerapan ke dalam sastra Arab, kata *dusturiyah* berkembang menjadi suatu asas, dasar, serta pembinaan, yang menurut istilah dapat diartikan suatu kaidah yang mengatur suatu hubungan kerja antar sesama anggota masyarakat terhadap suatu rencana rancangan terhadap tujuan di dalam sebuah negara atau dalam serapan bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai berdasarkan undang-undang dasar dari suatu negara.<sup>48</sup>

---

<sup>46</sup>Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 177.

<sup>47</sup>H. Ahmad Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 47.

<sup>48</sup>Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, ...., h. 177-178.

## b. Ruang Lingkup Kajian

Kajian mengenai ruang lingkup dalam *siyasah dusturiyah* yang secara umum dapat disimpulkan antaranya sebagai berikut:

- a. Persoalan imamah dan kewajiban
- b. Persoalan rakyat mengenai status dan hak-haknya
- c. *Ba'iat*
- d. *Waliyul Ahdi*
- e. Perwakilan
- f. *Wizarah* serta perbandingannya.<sup>49</sup>

Sehingga apabila jika ditinjau *siyasah dusturiyah* dapat dibagi menjadi beberapa bagian diantaranya:

- 1) *Siyasah Tasyri'iyah* yang mana *siyasah* ini termasuk di dalamnya mencakup perwakilan persoalan rakyat, hubungan muslim dan non muslim di dalam suatu negara seperti halnya UUD, peraturan perundang-undangan yang lainnya.
- 2) *Siyasah tanfidhiyah* yaitu termasuk yang di dalamnya pembahasan soal imamah persoalan *bai'ah*, *wuzarah*, *wali al-ahdi*, dan lainnya.
- 3) *Siyasah Qadha'iyah* yaitu di mana pembahasan mengenai permasalahan peradilan.
- 4) *Siyasah Idariyah* yaitu mengenai pembahasan administrasi dan kepegawaian.<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup> H. Ahmad Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, ...., h. 47.



Sehingga atas pembagian mengenai *siyasah dusturiyah* dapat disimpulkan bahwa *siyasah* ini merupakan segala aspek yang mengatur pemerintahan di dalam suatu negara mulai dari perancangan suatu ketetapan atas surat dasar negara hingga berbagai ke-administrasi yang berdasarkan pada tuntutan syariat Islam.

### c. Konsep Negara Hukum

#### 1) Konstitusi

Konstitusi pada dasarnya juga disebut sebagai *dusturi* namun menurut istilah *dustur* sendiri merupakan suatu kumpulan kaidah yang mengatur mengenai dasar-dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat di dalam sebuah negara. Baik berupa tertulis maupun tidak tertulis, sehingga jika diserap di dalam bahasa Indonesia kata *dustur* sendiri ialah peraturan Undang-Undang Dasar (UUD). Sehingga jika dikaitkan dalam ketentuan hukum Islam bahwa sumber utama nya yaitu ketentuan dari alquran dan hadits, akan tetapi karena alquran bukanlah suatu undang-undang maka alquran tidak mengatur secara menyeluruh dan terperinci mengenai bagaimana hak dan kewajiban dari masing masing msyarakat yang hidup di dalam sebuah negara khususnya antara rakyat dengan pemerintah.<sup>51</sup>

<sup>50</sup> *Ibid*, h. 48.

<sup>51</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), h. 281.

## 2) Legislasi

Dalam kajian *fiqh siyasah*, legislasi atau kekuasaan legislatif disebut juga dengan *al-sulthah al-tasyri'iyah*, yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum. Menurut Islam, tidak seorangpun berhak menetapkan hukum yang akan diberlakukan bagi umat Islam. Akan tetapi, dalam wacana *fiqh siyasah*, istilah *al-sulthah al-tasyri'iyah* digunakan untuk menunjukkan salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam dalam mengatur masalah kenegaraan.<sup>52</sup>

Dalam konteks ini, kekuasaan legislatif berarti kekuasaan atau kewenangan pemerintah Islam untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakatnya.

Berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan Allah SWT dalam syariat Islam. Dengan demikian unsur-unsur legislasi dalam Islam meliputi:

- a) Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dalam masyarakat Islam;
- b) Masyarakat Islam yang akan melaksanakannya;
- c) Isi peraturan atau hukum harus sesuai dengan nilai-nilai dasar syariat Islam

Wewenang dan tugasnya Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan yang terpenting dalam pemerintahan Islam, karena

---

<sup>52</sup>Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Politik Islam*, ...., h. 187

ketentuan dan ketetapan yang dikeluarkan lembaga legislatif ini akan dilaksanakan secara efektif oleh lembaga eksekutif dan dipertahankan oleh lembaga yudikatif atau peradilan. Orang-orang yang duduk di lembaga legislatif ini terdiri dari para *mujtahid* dan ahli fatwa (*mufti*) serta pakar dalam berbagai bidang. Karena menetapkan syariat sebenarnya hanyalah wewenang Allah, maka wewenang dan tugas lembaga legislatif hanya sebatas menggali dan memahami sumber-sumber syariat Islam, yaitu Alquran dan sunnah Nabi, dan menjelaskan hukum-hukum yang terkandung di dalamnya.<sup>53</sup>

Undang-undang dan peraturan yang akan dikeluarkan oleh lembaga legislatif harus mengikuti ketentuan-ketentuan kedua sumber syariat Islam tersebut. Oleh karena itu, dalam hal ini terdapat dua fungsi lembaga legislatif.

*Pertama*, dalam hal-hal yang ketentuannya sudah terdapat dalam nashsh Alquran dan sunnah, undang-undang yang dikeluarkan oleh *al-sulthah al-tasyri'iyah* adalah undang-undang Ilahiyah yang diisyariatkan-Nya dalam Al-Quran dan dijelaskan oleh Nabi SAW dalam hadits.

*Kedua*, yaitu melakukan penalaran kreatif (*ijtihad*) terhadap permasalahan-permasalahan yang secara tegas tidak dijelaskan oleh *nash*. Di sinilah perlunya *al-sulthah al-tasyri'iyah* tersebut diisi

---

<sup>53</sup> *Ibid*, h. 188.

oleh para mujtahid dan ahli fatwa. Mereka melakukan *ijtihad* untuk menetapkan hukumnya dengan jalan *qiyas* (analogi). Mereka berusaha mencari *illat* atau sebab hukum yang ada dalam permasalahan yang timbul dan menyesuaikannya dengan ketentuan yang terdapat dalam nash. *Ijtihad* mereka juga perlu mempertimbangkan situasi dan kondisi sosial masyarakat, agar hasil peraturan yang akan diundangkan itu sesuai dengan aspirasi masyarakat dan tidak memberatkan mereka.<sup>54</sup>

Bentuk dan perkembangan *al-sulthah al-tasyri'iyah* berbeda dan berubah dalam sejarah, sesuai dengan perbedaan dan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat Islam. Pada masa Nabi Muhammad SAW, otoritas yang membuat *tasyri'* (hukum) adalah Allah SWT. Allah menurunkan ayat-ayat Alquran secara bertahap selama lebih kurang 23 tahun. Adakalanya ayat tersebut diturunkan untuk menjawab suatu pertanyaan, adakalanya pula untuk menanggapi suatu perubahan atau permasalahan yang terjadi dalam masyarakat. Di samping itu, Nabi SAW juga berperan sebagai penjelas terhadap ayat-ayat Alquran yang masih bersifat global dan umum.<sup>55</sup>

### 3) Ummah

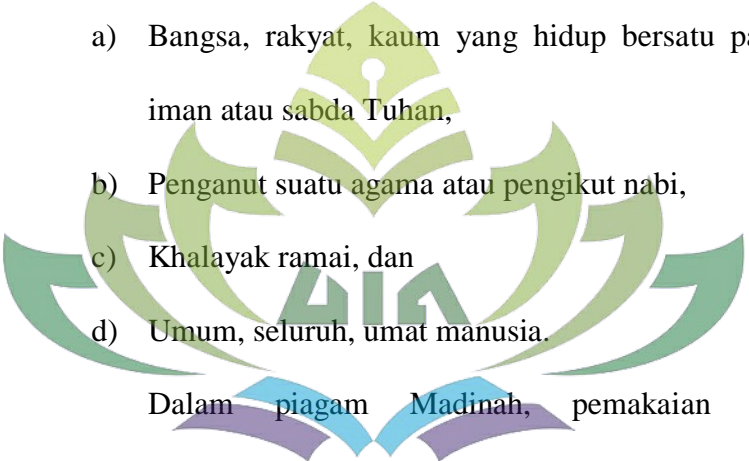
Ummah Dalam pengertian kata ummah yang di indonesia menjadi kata umat adalah sebuah konsep yang telah akrab dalam

---

<sup>54</sup> Muhammad Iqbal, *The Reconstruction of Religion Thought in Islam*, (Delhi: Kitab Bhavan, 1981), h. 155.

<sup>55</sup> *Ibid.*

masyarakat, akan tetapi sering dipahami secara keliru. Istilah ini, karena begitu dekat dengan kehidupan sehari-hari yang sering terabaikan dan tidak dianggap sebagai pengertian ilmiah. Dari kalangan Islam, pembahasan konsep ummah antara lain dilakukan oleh Ali Syari'ati dalam bukunya *al-Ummah wa al-Imamah* dan Muhammad Quraish Shihab dalam bagian karya tafsir tematiknya wawasan Alquran. Dalam Ensiklopedia Indonesia umat mengandung empat macam pengertian, yaitu: <sup>56</sup>

- 
- a) Bangsa, rakyat, kaum yang hidup bersatu padu atas dasar iman atau sabda Tuhan,
  - b) Penganut suatu agama atau pengikut nabi,
  - c) Khalayak ramai, dan
  - d) Umum, seluruh, umat manusia.

Dalam piagam Madinah, pemakaian kata ummah mengandung dua pengertian yaitu:

*Pertama*, organisasi yang diikat oleh aqidah Islam, terlihat dari bunyi pasal satu piagam tersebut yang artinya sesungguhnya mereka (suku Quraisy dan penduduk asli Madinah) adalah suatu umat, yang berbeda dengan komunitas manusia lain. <sup>57</sup>

*Kedua*, organisasi umat yang menghimpun jamaah atau komunitas yang beragam atas dasar ikatan sosial politik, seperti tersurat dalam pasal 25 yang berbunyi sesungguhnya *Banu 'Awf*

<sup>56</sup>Hasan Sadhili, *Ensiklopedia Indonesia*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1980), h. 6

<sup>57</sup> H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, ...., h. 211.

merupakan suatu umat dengan orang mukmin. Bagi Yahudi agama mereka dan bagi kaum muslimin juga agama mereka. Kebebasan ini berlaku bagi sekutu-sekutu dan diri mereka sendiri, kecuali yang berbuat aniaya dan jahat. Dalam pasal ini Yahudi tidak dimaksudkan sebagai pengertian agama, tetapi pengertian suatu kelompok dalam sebuah negara Madinah.<sup>58</sup>

Alquran menegaskan bahwa umat Islam merupakan umat pertengahan (*ummatan wasathan*) yang harus menjadi teladan manusia lainnya karena ummah dilandasi oleh semangat universal Islam, maka Islam tidak dapat membenarkan nasionalis sempit yang menganggap tanah, wilayah, ras, darah, dan hal-hal lain yang sangat artifisial sebagai pengikat di antara manusia. Nasionalisme seperti ini hanya akan memngarahkan manusia pada pengagungan nilai-nilai *tribalisme*.<sup>59</sup>

#### 4) Negara Berdasarkan Amr Ma'ruf Nahi Munkar

Tujuan Islam ialah guna mensejahterakan umat manusia yang tidak terbatas kepada komunitas tertentu akan tetapi mencaup semua umat manusia dalam permasalahan di kehidupan, sehingga suatu asas dalam pemerintahan untuk kenegaraan yang berdasarkan pada prinsip *amar ma'ru nahi munkar*, pada penjelasan secara umum mengenai amar ma'ruf nahi munkar tidak hanya menyangkut tentang hal-hal yang berkaitan dengan pokok-pokok

---

<sup>58</sup>*Ibid.*

<sup>59</sup>*Ibid*, h. 222.



pembahasan mengenai keagamaan saja, akan tetapi sudah secara meluas termasuk ke dalam aspek sosial, budaya serta perpolitikan. Terkhusus terhadap aspek politik sudah dijelaskan ke dalam surat Ali-Imran ayat 104, menyeru terhadap kebajikan secara menyeluruh kepada yang *ma'ruf* serta pencegahan terhadap yang *munkar*.<sup>60</sup>

Maka dalam hal ini tidak ada kebebasan dari sembarang orang atau kelompok untuk secara langsung melakukan tindakan kekerasan ataupun diskriminatif terhadap suatu individu dengan suatu kelompok lainnya. Selain itu implementasinya juga harus didasarkan pada penghargaan akan keniscayaan perbedaan, kesamaan yang tumbuh dalam kehidupan politik bermasyarakat, serta sangat tidak diperkenankan atas tindakan membedakan suatu hal baik perbedaan antara laki-laki dan wanita, muda dan yang tua, kulit putih dan kulit hitam. Sehingga gerakan amar *ma'ruf* nahi *munkar* dengan muatan-muatan penegakkan dan penerapan atas kesamaan dalam aspek politik ditujukan atas pembangunan sistem kemajuan suatu politik di dalam suatu ketatangaraan dan dijalankan secara global, stimulan serta berkelanjutan.<sup>61</sup>

##### 5) Negara Berdasarkan Pluralisme Hukum

Konsep dalam hukum Islam memang sangatlah berbeda jauh dengan konsep penetapan hukum positif sebagai produk kreasi atas

---

<sup>60</sup>Marly Chandra, The Penology of Islamic Criminal Law, *al-Adalah*, Vol. 15, No. 2, (2018), h. 348.

<sup>61</sup>*Ibid.*

suatu seni yang diciptakan oleh pemerintahan yang berkuasa terkhusus penetapan-penetapan bagi peraturan yang belum ada. Perbedaan tersebut dapat terlihat dengan jelas pada kaidah hukum Islam yang sangat bervariasi dan semuanya berpedoman pada tuntunan ajaran *al-Qur'ân* dan *Hadîts*, sedangkan hukum positif hanya berpedoman terhadap pikiran akal manusia yang dikuasai oleh nafsu, sehingga dapat menimbulkan suatu kesalahan pada isi peraturan hukum tersebut sehingga bersifat relatif.

Penetapan pluralisme hukum sebagai instrumen penguatan *civil society* dalam kehidupan bernegara dirasa memiliki hubungan struktur sosial antara suatu bentuk golongan tertentu dengan golongan yang lain, sehingga dengan adanya asas guna sebagai penguatan instrumen *civil society* diharapkan mampu memperkuat kesamaan seiring sejalan dan seirama agar terwujudnya tujuan bernegara dengan cara menghilangkan identitas pribadi ataupun golongan, sebaliknya hal tersebut digunakan untuk memunculkan identitas masyarakat yang satu bersifat heterogen dan pluralisme.<sup>62</sup>

Kajian Islam terhadap instrumen pluralisme tanpa membedakan suatu golongan tertentu atas unsur tahta, umur, suku dan agama dengan tujuan terlaksananya suatu sistem pemerintahan bernegara yang menghormati satu sama lain dan memberikan kesempatan kepada siapapun tanpa harus melakukan tindakan diskriminatif

---

<sup>62</sup>Dedy Sumardi, *Islam Pluralisme dan Refleksi Masyarakat Homogen, Asy-Syir'ah*, Vol. 50, Nomor. 2, (Desember, 2016), h. 488.

terhadap siapapun, sehingga terwujudnya keadilan sosial bagi masyarakat sesuai dengan dasar ideologi negara Indonesia dan juga berdasarkan ketatanegaraan dalam Islam (siyasah), yang harus dilaksanakan oleh pemerintah yang dalam hal ini turut berperan partai politik dalam penyusunan rancangan kebijakan yang dibuat dalam pemerintahan, berdasarkan suatu prinsip berpegang teguh pada inti ideologi spiritual. Hal ini sudah terang dijelaskan dalam kehidupan masyarakat dalam bernegara dari ketentuan hukum Islam.

## 2. Prinsip Ketatanegaraan Islam

### a. *Syura'*

*Syûrâ* adalah salah satu prinsip utama politik Islam. Ia menjadi satu-satunya faktor utama ke arah kejayaan sistem politik dan pemerintahan Islam. Di samping itu *syûrâ* menjamin bahwa sistem diktator tidak akan terwujud di kalangan umat Islam jika sistem ini betul-betul diikuti. Di dalam Alqur'an surat *al-Syûrâ* /42: 38 Allah memuji orang-orang yang beriman yang menjadikan *syûrâ* sebagai suatu sifat kepribadian mereka. Tugas mereka adalah bermusyawarah di antara sesama mereka dalam mencari penyelesaian terhadap setiap persoalan yang menimpa mereka. Dalam QS. *as-Syûrâ* 38-42 tersebut berbunyi:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿٢٨﴾ وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ ﴿٢٩﴾ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا ۖ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ۗ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ﴿٣٠﴾ وَلَمَنْ أَنْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِّنْ سَبِيلٍ ﴿٣١﴾ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ۗ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: Dan orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka, dan mereka menafkahkan sebagian rizki yang kami berikan kepada mereka.<sup>63</sup>

Dapatlah dikatakan bahwa pemerintah Islam di suatu masa diberi kewenangan untuk menentukan bentuk dan corak *syûrâ* di masanya dengan syarat prinsip-prinsip Islam, syarat-syarat dan adab-adab *syûrâ* Islam hendaklah diikuti.<sup>64</sup> Islam tidak menetapkan cara pelaksanaan yang khusus, sebab jika ini dibuat sudah tentu akan membawa kepada *Jumud* atau kakunya sistem *syûrâ* itu sendiri yang sama sekali tidak sesuai dengan sifat undang-undang politik dan juga

<sup>63</sup>Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, ...., h. 1134.

<sup>64</sup>Muhammad Asad, *The Principles of State and Government in Islam*, edisi pertama oleh University of California Press, 1961, Kuala Lumpur: Islamic Book Trust, 2000, h. 44. "... the key word "consultation" (*syûrâ*) has a double import. Firstly, it is meant to remind all followers of the Qur'ân that they must remain united within one single community (*ummah*); and secondly, it lays down the principle that all their communal business must be transacted in mutual consultation. Muhammad Asad, *The Message of the Qur'ân*, Gibraltar: Dâr al-Andalus, 1980., h. 746

tidak sesuai dengan sifat agama Islam. Inilah yang menjadi pendapat inti Asad tentang *syûrâ*.<sup>65</sup>

## b. Prinsip Keadilan

Perkataan keadilan sama hal dengan musyawarah yang bersumber dari Alquran. Cukup banyak ayat-ayat Alquran yang menggambarkan tentang keadilan, di antaranya terdapat dalam surah al-Nisa' (4): 135

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ  
أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللّٰهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا  
تَتَّبِعُوا أَهْوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا ۚ وَإِنْ تَلَوَّدَا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا  
تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. jika ia kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.*<sup>66</sup>

Dari ayat tersebut di atas sekurang-kurangnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Orang-orang yang beriman wajib menegakkan keadilan.
- 2) Setiap mukmin apabila ia menjadi saksi ia diwajibkan menjadi saksi karena Allah dengan sejujur-juurnya dan adil.

<sup>65</sup>Asad, State, h. 80.

<sup>66</sup>Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, ...., h. 156.

- 3) Manusia dilarang mengikuti hawa nafsu.
- 4) Manusia dilarang menyelewengkan kebenaran.<sup>67</sup>

Keadilan merupakan salah satu prinsip yang sangat penting dalam Alquran. Oleh karena Allah sendiri memiliki sifat Maha Adil. Keadilan-Nya penuh dengan kasih sayang kepada makhluk-Nya (rahman dan rahim). Dalam Islam, keadilan adalah kebenaran. Kebenaran adalah merupakan salah satu nama Allah. Dia adalah sumber kebenaran yang di dalam Alquran disebut *al-haq*. Oleh karena itu, Al-Syaukani, sebagaimana yang dikutip Abd. Muin Salim, menyatakan bahwa keadilan adalah menyelesaikan perkara berdasarkan ajaran yang terdapat dalam Alquran dan sunah, bukan menetapkan hukum dengan pikiran.<sup>68</sup> Apabila prinsip keadilan dibawa ke fungsi kekuasaan negara, maka ada tiga kewajiban pokok bagi penyelenggara negara atau suatu pemerintahan sebagai pemegang kekuasaan, yaitu:

- 1) Kewajiban menerapkan kekuasaan negara yang adil, jujur, dan bijaksana;
- 2) Kewajiban menerapkan kekuasaan kehakiman yang seadil-adilnya;

---

<sup>67</sup> Abd. Muin Salim, *Konsepsi Kekuasaan Politik Dalam Al-Qur'an* (Cet. II; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1995), h. 214.

<sup>68</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: Toha Putra, 1988), h. 847.



- 3) Kewajiban penyelenggara negara untuk mewujudkan suatu tujuan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera di bawah keridhaan Allah.

### c. Prinsip Kebebasan

Konsep kebebasan sangat sentral dalam pemikiran individualisme dan liberalisme Eropa. Kini, dapat dikatakan bahwa semua negara demokrasi menjamin hak persamaan dan kebebasan rakyatnya.<sup>69</sup> Dalam tradisi ini, kebebasan berarti sebuah kondisi yang dicirikan oleh ketiadaan pemaksaan (*coersion*) atau pembatasan (*constraint*) yang dilakukan oleh orang lain.<sup>70</sup> Pendapat penting muncul dari pemikiran Bertrand Russell yang sering dikutip, “Secara umum, kebebasan dapat didefinisikan sebagai ketiadaan rintangan untuk merealisasikan hasrat”.<sup>71</sup> Pernyataan ini sedikit menyulitkan untuk mengindikasikan adanya pembatasan yang tak terbatas terhadap pilihan manusia. Dalam Islam, konsep kebebasan secara mendasar telah menuntut akan arti tanggung jawab.<sup>72</sup>

Selanjutnya, para sarjana hukum konstitusional modern membagi kebebasan menjadi beberapa cabang: kebebasan berpikir, kebebasan berkeyakinan, hak untuk mendapatkan pendidikan dan

<sup>69</sup>Abdurrahman Abdulkadir Kurdi, *The Islamic State: A Study based on the Islamic Holy Constitution*, (London and New York: Mansell Publishing Limited, 1984), h. 50.

<sup>70</sup>Felix E. Oppenheim, *Dimensions of Freedom: An Analysis*, (New York: St. Martin's Press, 1961), h. 33-37

<sup>71</sup>Bertrand Russell, “Freedom and Government”, dalam Ruth N. Anshen (ed.), *Freedom: Its Meaning*, (New York: Macmillan, 1941), h. 251.

<sup>72</sup>Rahman, Mohammad Taufiq. *"Social Justice in Western and Islamic Thought: A Comparative Study of John Rawl's and Sayyid Qutb's Theories of Social Justice."* PhD diss., *Jabatan Akidah dan Pemikiran Islam*, (Akademi Pengajian Islam: Universiti Malaya, 2010), h. 20

kepemilikan, dan kebebasan pribadi. Sebagian dari cabang-cabang ini, pada gilirannya, dapat dibagi menjadi beberapa bagian seperti dalam kasus kebebasan personal yang dapat dikategorikan ke dalam hak untuk hidup, kebebasan dan keselamatan diri, serta kebebasan bergerak.<sup>73</sup>

Dalam kaitan dengan negara Islam, menurut Asad, pada dasarnya, negara Islam mengemban tugas “memberi jaminan pada seluruh warganya untuk mendapatkan keselamatan fisik sekaligus kebebasan untuk beragama, berbudaya dan bermasyarakat.”<sup>74</sup>

Mengikuti klasifikasi model di atas, berikut dikemukakan bagaimana Islam telah menampakkan diri sebagai agama yang memperjuangkan kebebasan manusia, melalui pendapat Asad.

Menurut Asad, negara Islam mengemban tugas “untuk melakukan perlindungan terhadap kehidupan pribadi warganya.”<sup>75</sup>

Demikian itu karena jiwa umat Islam itu terhormat.<sup>76</sup> Islam mengharamkan pembunuhan manusia kecuali menurut undang-undang Islam. Pembunuhan seseorang yang dibuat secara sengaja dan tanpa alasan-alasan yang sah menurut undang-undang Islam dianggap sebagai perbuatan membunuh seluruh manusia dan barangsiapa yang memelihara satu jiwa maka ia dianggap sebagai telah memelihara

---

<sup>73</sup> S.A. De Smith, *Constitutional and Administrative Law*, (London: Oxford University Press, 1965), h. 440-457.

<sup>74</sup> Asad, *State*, h. 33.

<sup>75</sup> Asad, *State*, h. 84.

<sup>76</sup> Dalam hal ini Asad mengutip hadits riwayat Muslim dari Jâbir ibn Abd Allâh tentang *khuthbah* perpisahan Nabi saw. di Arafah. Asad, *State*, h. 84.

seluruh kehidupan manusia. Hal ini disebutkan di dalam QS. al-Mâ'idah/5:32, yaitu:

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَءِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ  
نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا  
فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ۚ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ  
كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴿٣٢﴾

Artinya: *Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seolah-olah dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seseorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya.*<sup>77</sup>

Jadi, ayat ini menyatakan bahwa nyawa seseorang tidak boleh diambil kecuali dalam dua keadaan: Atas dasar *qishâsh*, karena orang itu membunuh orang lain, dan karena ia melakukan kerusakan di muka bumi, sebab ia merampok atau membunuh.

Selain dari yang disebutkan di atas, seseorang itu diberi hak mendapat perlindungan dari penyalahgunaan kekuasaan dari pihak yang berkuasa. Selanjutnya adalah Kebebasan beragama. Menurut Asad, dalam Islam, semua orang berhak menganut dan mengamalkan ajaran agamanya dengan bebas dan aman.

<sup>77</sup>Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, ...., h. 232.

#### d. Prinsip Persamaan

Prinsip persamaan dalam Islam dapat dipahami antara lain dari alquran surah al-Hujurat (49): 13

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya: *Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang lakilaki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi maha mengenal.*<sup>78</sup>

Ayat itu melukiskan bagaimana proses kejadian manusia. Allah telah menciptakannya dari pasangan laki-laki dan wanita. Pasangan yang pertama adalah Adam dan Hawa, kemudian dilanjutkan oleh pasangan-pasangan lainnya melalui suatu pernikahan atau keluarga. Jadi semua manusia melalui proses penciptaan yang “seragam” yang merupakan suatu kriteria bahwa dasarnya semua manusia adalah sama dan memiliki kedudukan yang sama. Inilah yang disebut prinsip persamaan.<sup>79</sup>

#### e. Prinsip Pluralisme

Sebelum membedah pemikiran Asad tentang pluralisme, diperlukan sedikit latar belakang mengapa isu pluralisme ini muncul. Pada awalnya, masyarakat itu relatif homogen secara rasial, etnis, dan

<sup>78</sup>Ibid, h. 563.

<sup>79</sup>Asad, State, 41-42. “... implying that this equality of biological irigin is reflected in the equality of the human dignity common to all...”. *The Message*, h. 794.

agama.<sup>80</sup> Namun, dalam perkembangannya, masyarakat menjadi plural atau pluralistik.<sup>81</sup>

Demikian pula, pluralisme terjadi dengan migrasi. Pada masa kemunculan komunitas Muslim di Semenanjung Arab, sudah terdapat komunitas Yahudi dan Kristen di Madinah, Khaybar, Tayma', Nejd dan Arabia Selatan.<sup>82</sup> Selain itu, pluralisme pun terbentuk oleh perbudakan: hal itu terlihat dengan adanya orang-orang hitam dari Ethiopia di zaman Nabi Muhammad SAW.<sup>83</sup> Dalam sejarahnya, kemudian, kekuasaan Islam memang selalu dihadapkan dengan pluralisme. Dan untuk pluralisme ini umat Islam telah menunjukkan kemampuan mereka untuk memerintah dengan relatif aman, walaupun menghadapi berbagai macam orang dengan begitu banyak perbedaan ras, etnik dan bahasa.<sup>84</sup>

Di samping itu, dengan adanya kontak mereka dengan budaya lain, selain Arab-Islam, mereka menemukan agama lain. Orang-orang non-Muslim itu, yang dimotivasi oleh 'keuntungan bisnis, melakukan

---

<sup>80</sup> Ahmad Yousif, "Islam, Minorities and Religious Freedom: A Challenge to Modern Theory of Pluralism," *Journal of Muslim Minority Affairs*, (Vol. 20, No. 2, 2000), h. 29.

<sup>81</sup> Di sini penulis tidak bermaksud untuk membedakan kata "plural" dan "pluralistic". Walaupun begitu, Smith menyatakan bahwa "plural" merujuk pada model masyarakat yang seimbang (equilibrium), sedangkan "pluralistic" merujuk pada model masyarakat konflik. M. G. Smith, *The Plural Society in the British West Indies*, (Berkeley: University of California Press, 1965), *passim*.

<sup>82</sup> Menurut Saunders, komunitas ini terbentuk oleh imigran Palestina setelah keruntuhan Yerusalem yang dihancurkan oleh Nebuchadnezzar pada tahun 586 SM. J.J. Saunders, *The History of Medieval Islam*, (London: Routledge & Kegan Paul, 1982), h. 11; Christopher Toll, 'The Purpose of Islamic Studies', dalam Klaus Ferdinand and Mehdi Mozaffari (eds.), *Islam: State and Society*, (Copenhagen: Scandinavian Institute of Asian Studies, 1988), h. 13.

<sup>83</sup> Spencer-Trimingham, *Christianity Among the Arabs in Pre-Islamic Times*, (London: Longman, 1979), h. 249.

<sup>84</sup> Yvonne Y. Haddad, *Islamists and the Challenge of Pluralism*, Occasional Papers, Center for Contemporary Arab Studies and Center for Muslim-Christian Understanding, (Georgetown University, 1995), h. 21.

misal, dan pencarian pengetahuan beserta penggunaan praktisnya<sup>85</sup> telah memberikan kondisi pluralistik pada sejarah Islam.

Tentang pluralisme ini, Asad menempatkannya pada pembicaraan tentang partisipasi politik masyarakat Muslim. Dalam hal ini konsepsi Asad tentang politik dan tata pemerintahan Islam betul-betul serba mencakup dan merupakan konsepsi yang siap digunakan.<sup>86</sup>

Menurut Asad, walaupun bersumber pada syari'at yang sama, masyarakat Muslim dapat pula berbeda-beda dalam opini mereka tentang ketatanegaraan. Menurutnya, pluralitas pandangan itu merupakan hal yang natural, karena penalaran manusia itu merupakan proses yang sangat subjektif dan tidak pernah betul-betul terlepas dari kecenderungan temperamental.

Kebiasaan, latar belakang sosial, dan pengalaman masa lalu pemikirnya. Dengan kata lain, pemikiran manusia itu tidak dapat terlepas dari semua pengaruh yang membentuk apa yang dikatakan sebagai "kepribadian manusia". Walaupun begitu, Asad menyadari bahwa kemajuan yang sejati tidak mungkin terwujud tanpa kemajemukan pendapat, karena hanya melalui perbedaan pandangan

---

<sup>85</sup>Christopher Toll, *Islam: State and Society*, h.13.

<sup>86</sup>Pemikiran Asad tentang hal ini, misalnya sesuai dengan outline permasalahan yang harus dihadapi oleh sebuah sistem politik yang diketengahkan oleh Almond dan Powell, yaitu permasalahan tentang bangunan-negara (state-building), bangunan-bangsa (nation-building), partisipasi, dan permasalahan tentang distribusi kekayaan. Gabriel A. Almond dan G. Bingham Powell, Jr., *Comparative Politics: A Developmental Approach*, (Boston: Little Brown and Company, 1966), h. 35.

itulah masalah-masalah kemasyarakatan dapat diperjelas dan dapat ditemukan pilihan solusinya.<sup>87</sup>

Sesuai dengan firman Allah dalam suat al-Maidah ayat 48 yang berbunyi:

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ  
وَمُهَيِّمًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا  
جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمَنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ  
لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ  
إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

Artinya: *Dan kami telah turunkan kepadamu Al Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, Yaitu Kitab-Kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian, terhadap Kitab-Kitab yang lain itu; Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. untuk tiap-tiap umat diantara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu.*<sup>88</sup>

Di sinilah, kemudian, Asad perlu mengutip sebuah hadits populer yang ia temukan di dalam kitab *al-Jâmi' al-Shagîr*-nya *al-Suyûthî*, yaitu “perbedaan opini di antara umatku itu adalah (sebuah

<sup>87</sup> Asad, State, “... implying that this equality of biological irigin is reflected in the equality of the human dignity common to all...”. *The Message* h. 48.

<sup>88</sup> Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah*, ...., h. 234.



tanda) rahmat Tuhan.”<sup>89</sup> Perbedaan pendapat yang biasanya kemudian melahirkan perbedaan golongan inilah yang menjadi ajang pergulatan musyawarah dalam negara Islam. Pada gilirannya, Asad kemudian melegalisasi adanya partisipasi masyarakat melalui kelompok-kelompok politik, yang nantinya dilakukan suatu seleksi di dalam *Majlis Syûrâ*.<sup>90</sup>

Selain teks di atas, Asad juga perlu menjelaskan bahwa secara natural pengelompokan politik itu dapat terjadi. Ia mengemukakan hal ini dengan sejarah para sahabat Nabi Muhammad SAW Menurutnya, mau tidak mau para sahabat harus berhadapan dengan bentuk pengelompokan masyarakat yang sudah menjadi warisan tradisional, yaitu berdasarkan suku dan klan.<sup>91</sup> Yang dapat digambarkan di sini, dengan demikian, adalah suatu bentuk perwakilan.

Maka, bagi masyarakat Muslim modern, perwakilan itu harus ada, apapun bentuknya. Di sinilah Asad menyetujui pluralitas politik dengan pluralitas partai, sebagai wahana aspirasi masyarakat. Karena, menurutnya, jika kebebasan berpendapat dan melakukan kritik itu diakui sebagai hak inherent warganegara, maka masyarakat harus disetujui untuk bebas berkumpul dan mempropagandakan pemikiran mereka sehingga dapat mempengaruhi kebijakan negara, baik di

---

<sup>89</sup> Asad, State, “... implying that this equality of biological origin is reflected in the equality of the human dignity common to all...”. *The Message* h. 48.

<sup>90</sup> *Ibid*, h. 49.

<sup>91</sup> *Ibid*, h. 54.

dalam maupun di luar *Majelis Syûrâ*. Inilah yang dikatakannya sebagai sistem politik Islam.<sup>92</sup>

Demikian Asad, akan timbul kesejahteraan material dan kekuatan politik. Sebaliknya, jika moralitas masyarakat lemah, maka akan lemah pula kondisi sosial, ekonomi, dan politik.<sup>93</sup>

Keberagaman pendapat dalam masyarakat, menurut Asad, merupakan hikmah dari adanya *ijtihâd*. Kebebasan *ijtihâd* inilah yang menjadi kewajiban moral dan sosial sehingga semua masalah umat dapat didiskusikan. Para pemimpin umat secara moral terikat membawa kemajuan kepada publik, apapun pemikiran baru mereka. Untuk itu, hak untuk mengekspresikan opini dalam bentuk diskusi ataupun tulisan merupakan hak fundamental setiap warganegara dalam sebuah negara Islam. Tentu saja, demikian Asad, hal ini perlu dimengerti bahwa kebebasan opini dan ekspresinya tidak boleh digunakan untuk melawan hukum Islam atau memberontak pada pemerintahan yang sah.<sup>94</sup>

#### **f. Prinsip Kesejahteraan**

Prinsip ini menyatakan bahwa ada suatu motivasi dalam pelaksanaan prinsip kesejahteraan yaitu doktrin Islam *hablun minallah hablun minannasyaitu* dapat dikatakan suatu aspek ibadah, ekonomi, budaya dan politik dalam ruang lingkup ke Islaman, dengan artian lainnya yaitu merupakan realisasi prinsip kesejahteraan yang semata-

---

<sup>92</sup>*Ibid*, h. 61.

<sup>93</sup>*Ibid*, h. 82.

<sup>94</sup>*Ibid*, h. 83.

mata bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh aspek masyarakat.<sup>95</sup> Prinsip ini sesuai dengan firman Allah dalam surat at-Taubah ayat 105 yang berbunyi:

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ  
عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

Artinya: *Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.*<sup>96</sup>

Selain itu prinsip ini juga sesuai dengan apa yang dihaditskan oleh Rasulullah mengenai prinsip kesejahteraan, di dalam kitab *asbaha wa al-Nazair* yang berbunyi sebagai berikut:

تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّأْيَةِ مَنُوطٌ بِالصَّلَاحِ  
Artinya: *Kebijakan pemimpin kepada rakyatnya harus sesuai dengan kemaslahatan atau kesejahteraan rakyatnya*<sup>97</sup>

Penjelasan ayat di atas bahwa setiap pemimpin yang mengendalikan kebijakan dalam bernegara haruslah mempertimbangkan dan memperhatikan kemaslahatan ataupun kesejahteraan bagi rakyatnya tanpa ada tindakan yang menimbulkan kemudharatan khususnya dalam hal ini PSI selaku pemeran pengendali dan pelaksana kebijakan jika melirik pada prinsip dari visi

<sup>95</sup>Kurniawan, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. XIII, Nomor. 55, (Desember, 2011), h. 158.

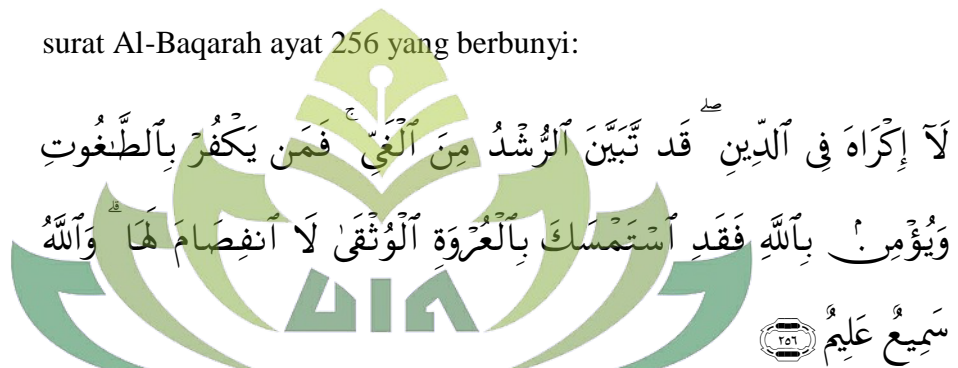
<sup>96</sup>Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah*, ...., h. 334.

<sup>97</sup>Imam Suyuti, *Kitab Ahsab bi al-Nazair*, (Beirut: Darul Kutub al-Ilmiah),h. 83.

dan misi dan wacana kebijakan dikhawatirkan menimbulkan kemudharatan bagi umat yaitu menciptakan tindakan diskriminatif.

#### g. Prinsip Pengakuan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia

Prinsip pengakuan dan perlindungan hak ini merupakan pernyataan bahwa setiap warga negara dijamin hak-hak dasar tertentu sehingga dari sini harus adanya suatu bentuk perlindungan seperti perlindungan terhadap keamanan pribadi dan lain sebagainya,<sup>98</sup> dalam hal prinsip ini sangat banyak dijumpai di dalam Alquran seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 256 yang berbunyi:



Artinya: *Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. karena itu Barangsiapa yang ingkar kepada thaghut dan beriman kepada Allah, maka Sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.*<sup>99</sup>

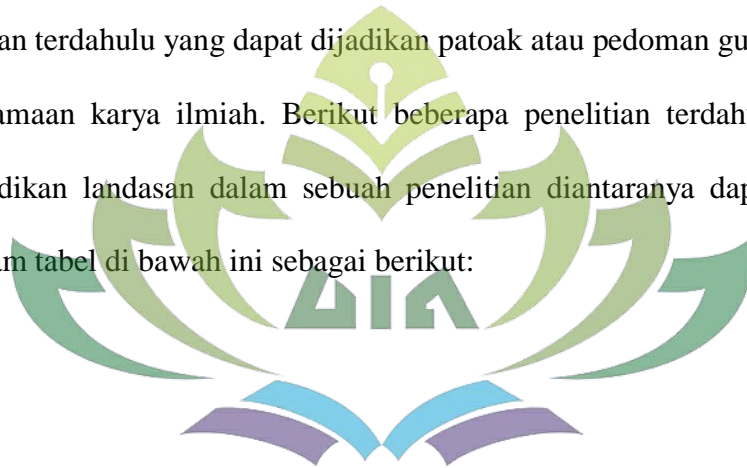
Pada penjelasan ayat di atas dapat dikatakan bahwa di dalam Islam sangat mengakui adanya pengakuan serta perlindungan bagi hak asasi manusia, mulai dari segala aspek, tujuan tersebut bertujuan untuk memungkinkan agar terhindarnya kemudharatan dari setiap diri manusia

<sup>98</sup>Mutiara Fahmi, *Petita*, Prinsip Dasar Hukum Politik Islam dalam Perspektif Al-Qur'an, ...., h. 58.

<sup>99</sup>Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah*, ...., h 56

#### **D. Tinjauan Pustaka**

Penelitian terdahulu merupakan acuan terhadap penelitian selanjutnya, di mana penelitian tersebut dipergunakan untuk dilakukan komparasi (perbandingan) hasil penelitian. Sehingga dari tujuan dilakukannya tinjauan pustaka itu sendiri ialah agar terhindarnya dari suatu tindakan plagiarisme agar penelitian terhadap skripsi ini benar-benar secara riil (nyata) serta dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga atas tindakan yang dilakukan guna meninjau dari pustaka atau referensi lain, penulis dapat menuangkan beberapa kajian terdahulu yang dapat dijadikan patokan atau pedoman guna menghindari kesamaan karya ilmiah. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang dapat dijadikan landasan dalam sebuah penelitian diantaranya dapat disajikan di dalam tabel di bawah ini sebagai berikut:



**Tabel 1.**  
**Rizqi Josta Sanggam**

Nama, Tahun, Judul Penelitian	Variabel dan Indikator atau Fokus Penelitian	Metode Analisis Data	Hasil Penelitian
Rizqi Josta Sanggam, (2018), Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Strategi Partai Golkar dalam Pemenangan Pilkada 2015 di Kota Bandar Lampung	Untuk mengetahui perspektif siyasah mengenai strategi Partai Golongan Karya dalam politik pemilihan walikota bandar lampung	Deskriptif Analitis	Ditinjau dari segi siyasah terhadap strategis yang diterapkan dalam politik untuk memenangkan pilkada berdasarkan konsep siyasah sesuai dengan perkembangan era politik era kontemporer, hal ini dikarenakan prinsip golkar tersebut sudah sesuai dengan <i>maqashid syar'ah</i> .

Sumber: Risqi Josta Sanggam, Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018.

**Tabel 2.**  
**Joko Santoso**

Nama, Tahun, Judul Penelitian	Variabel dan Indikator atau Fokus Penelitian	Metode Analisis Data	Hasil Penelitian
Joko Sanoso, (2010), Strategi Politik Partai Keadilan Sejahtera Pada Pemilu 2009 D. I. Yogyakarta Dalam Perspektif Fiqh Siyasah	Untuk mengetahui dan menjelaskan pandangan fikih siyasah terhadap prinsip atau strategi partai PKS pada pemilu tahun 2009	Deskriptif analitis	Strategi PKS ialah dengan dilakukan pelebaran segmen pemilih (tanpa membmdik kalangan tertentu) tetapi pada semua kalangan masyarakat tanpa membedakan usia, pendidikan dan lain sebagainya.

Sumber: Joko Santoso, Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, 2010.

**Keterangan:**

1. Persamaan dan perbedaan yang diteliti oleh peneliti dengan Risqi

Josta Sanggam antara lain:

Persamaan: terletak pada pembahasan mengenai strategi atau prinsip partai politik untuk mencapai suatu cita-cita partai dan metode analisa data yaitu bersifat deskriptif kualitatif.

Perbedaan: terletak pada partai dan strategi atau prinsip untuk tercapainya cita-cita partai yang telah tertuang pada



visi-misi masing-masing partai di mana partai golongan karya bersifat skala regional wilayah daerah sedangkan penelitian ini berskala kenegaraan dengan prinsip atau strategi partai dalam penelitian ini.

2. Persamaan dan perbedaan yang diteliti oleh peneliti dengan Joko Santoso antara lain:

Persamaan: terletak pada pembahasan mengenai strategi atau prinsip partai politik untuk mencapai suatu cita-cita dalam visi-misi partai.

Perbedaan: terletak pada partai dan strategi atau prinsip untuk tercapainya cita-cita partai yang telah tertuang pada visi-misi masing-masing partai di mana partai PKS bersifat skala regional wilayah daerah sedangkan penelitian ini berskala kenegaraan dengan prinsip atau strategi partai dalam penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Muin Salim, *Konsepsi Kekuasaan Politik Dalam Al-Qur'an*. Cet. II; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1995.
- Agus Aan Hermawan, Desember, 2014, *Persepsi Muda Terhadap Partai Politik Nasional Peserta Pemilu 2014 dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Politik Wilayah (Studi Pada KNPI Prov Banten)*, *Ketahanan Nasional*, Vol. 20, No. 3.
- Aahqiq Nanang, 2004, *Politik Islam*, (Jakarta: Kencana)
- Ahmad Yousif, *Islam, Minorities and Religious Freedom: A Challenge to Modern Theory of Pluralism*, *Journal of Muslim Minority Affairs*, (Vol. 20, No. 2, 2000),
- Ahmad Calam, Amnah Qurniati, *Merumuskan Visi & Misi Lembaga Pendidikan, Ilmiah Saintikom*, Vol. 15, No. 1, (Januari, 2016),
- Abdurrahman Abdulkadir Kurdi, 1984, *The Islamic State: A Study based on the Islamic Holy Constitution*, (London and New York: Mansell Publishing Limited)
- Felix E. Oppenheim, 1961, *Dimensions of Freedom: An Analysis*, (New York: St. Martin's Press)
- Bertrand Russell, 1941, *Freedom and Government*, dalam Ruth N. Anshen (ed.), *Freedom: Its Meaning*, (New York: Macmillan,)
- Al Hamdi, Ridho. *Partai Politik Islam; Teori dan Praktik di Indonesia* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013).
- Asad, Muhammad, *The Message of the Qur'ân*, Gibraltar: Dâr al-Andalus, 1980.
- Chandra Marly, *The Penology of Islamic Criminal Law, al-Adalah*, Vol. 15, No. 2, (2018)
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* Semarang: Toha Putra, 1988.
- Djazuli, 2009, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Kencana).
- Dedy Sumardi, *Islam Pluralisme dan Refleksi Masyarakat Homogen, Asy-Syir'ah*, Vol. 50, Nomor. 2, (Desember, 2016)

Firmanzah, Mengelola Partai Politik; Komunikasi dan Postioning Ideologi Politik di Era Demokrasi (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008).

Haddâd, Yvonne Y., Islamists and the Challenge of Pluralism, Occasional Papers, Center for Contemporary Arab Studies and Center for Muslim-Christian Understanding, Georgetown University, 1995.

Hanafi, A. Pengantar Teologi Islam (Jakarta: Pustaka Al-Husna Baru, 2003).

Hilda Handayani, *Pengertian Metode Induktif dan Metode Deduktif*, diakses dari <https://www.scribd.com/doc/285546689/Pengertian-Metode-Induktif-Dan-Metode-Deduktif>, tanggal 09 Desember 2018 pukul 23.58 WIB.

Hasan Sadhili, 1980, *Pimpinan Redaksi Ensiklopedia Indonesia*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve),

Imam Suyuti, 2007, Terjemahan *Kitab Ahsabh bi al-Nazair* (Bandung: Khazanah Ilmu)

Imam Yahya, 2010, *Gagasan Fikih Partai Politik dalam Khazanah Klasik* (semarang: Walisongo Press, ),

Labolo, Muhadam. *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia : Teori Konsep dan Strategi* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015).

Louis Ma'luf, 1975, *al-Munjid*, (Bayrut: Dar al-Masyrik)

Marbun, BN. *Kamus Politik* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2004).

Muhammad Pabunda Tika, 2006, *Metodologi Riset Bisnis*, (Jakarta: Bumi Aksara)

Muhammad Iqbal, 1981, *The Reconstruction of ReligionThought in Islam*, (Delhi: Kitab Bhavan,)

Mujar Ibnu Syarif, Khamami Zada, 2008, *Fikih Siyasa*, (Jakarta: Erlangga).

Muri Yusuf, 2014, *Metode Penelitian (Kuantitatif, Kualitatif dan Gabungan)*, (Jakarta: Kencana)

Mutiara Fahmi, April 2017, Prinsip Dasar Hukum Politik Islam dalam Perspektif Al-Qur'an, *Ar-Raniry*, vol. 2, No. 1.

Noer, Deliar. Pengantar ke Pemikiran Politik (Jakarta: Rajawali Press, 1993).

Oppenheim, Felix E., *Dimensions of Freedom: An Analysis*, New York: St. Martin's Press, 1961.

- Partai Solidaritas Indonesia, 2017, *Anggaran Dasar & Anggaran Rumah Tangga DPP PSI*, (Jakarta: DPP PSI)
- Romli, Lili. *Islam Yes Partai islam Yes; Sejarah Perkembangan Partai-partai Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006)
- Ridho Al Hamdi, *Partai Politik Islam;Teori dan Praktik di Indonesia* (Yogyakarta:Graha Ilmu, 2013)
- Rahman, Mohammad Taufiq, 2010, *Social Justice in Western and Islamic Thought: A Comparative Study of John Rawl's and Sayyid Qutb's Theories of Social Justice. PhD diss., Jabatan Akidah dan Pemikiran Islam*, (Akademi Pengajian Islam: Universiti Malaya)
- S. Nasution, 2004, *Metodologi Penelitian Dasar*, (Jakarta: Bulan Bintang)
- Smith, M.G., *The Plural Society in the British West Indies*, Berkeley: University of California Press, 1965.
- Soeranto Lincoln Arsyad, 2008, *Metode Penelitian untuk Ekonomi dan Bisnis*, (Yogyakarta: STIM YKPN)
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia).
- Spencer-Trimingham, *Christianity Among the Arabs in Pre-Islamic Times*, London: Longman, 1979.
- Bambang Yudhoyono, M. Jusuf Kalla, 2004, *Membangun Indonesia Yang Aman, Adil dan Sejahtera*, (Jakarta: Seketeris Negara)
- Sugiono, 2012, *Metode Penelitian kualitatif, Kuantitatif, R&D*, (Bandung: Alfabeta)
- Sri Kusriyah, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Politik Hukum Penyelenggaraan Otonomi Daerah dalam Perspektif Negara Kesatuan Republik Indonesia, Vol. III, Nomor. 1, (Januari, 2016),
- Toll, Christopher, *The Purpose of Islamic Studies*, dalam Klaus Ferdinand and Mehdi Mozaffari (eds.), *Islam: State and Society*, Copenhagen: Scandinavian Institute of Asian Studies, 1988
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik.

Yahya, Imam. *Gagasan Fikih Partai Politik dalam Khazanah Klasik* (Semarang: Walisongo Press, 2010).

Yousif, Ahmad, Islam, Minorities and Religious Freedom: A Challenge to Modern Theory of Pluralism, *Journal of Muslim Minority Affairs*, Vol. 20, No. 2, 2000.

Yusuf Hamdan, Pernyataan Visi & Misi Perguruan Tinggi, *Mimbar*, Vol. XVII, No. 1, (Maret, 2001

Yuni Retna Dewi, Pemahaman Karyawan Terhadap Visi Misi dan Tujuan FIKOM UPDM, *Wacana*, Vol. XII, No. 3, (Agustus, 2004)

Heri, *Pengertian Visi dan Misi*, Diakses Pada Laman Web <https://salamadian.com/pengertian-contoh-perbedaan-visi-dan-misi/>.

Kurniawan, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. XIII, Nomor. 55, (Desember, 2011)

